



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MK+

MK+ (Media Keuangan) merupakan media resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Majalah Media Keuangan
Volume XVI / NO. 208 / JANUARI 2023
ISSN 1907-6320





Cover Story

Berbagai kejadian dan momen kebijakan penting terjadi selama 2022. Semua rekaman itu, kami gambarkan dengan sebuah Tape Recorder dengan tombol rewind yang sedang ditekan. Rewind diibaratkan sebagai kilas balik rekam suatu peristiwa. Kami mencoba merangkum kilas balik berbagai peristiwa dan kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2022 pada edisi kaleidoskop ini.

Foto Sampul

Resha Aditya

Media Keuangan

adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan | **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati | **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara | **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi | **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari | **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana | **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia Astuti | **Dewan Redaksi:** Leni Nurlaeni, Titi Susanti, Agung Hardianto, Rizwan Pribhakti, **Tim Redaksi:** Reni Saptati, Rita Nurhayati, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, Aditya Wirananda, CS Purwowidhu Widayanti, Dodi Ahmad Siregar, Ni Made Ary Ramayanti, **Redaktur Foto:** Resha Aditya Pratama, Irfan Bayu, **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa.

Alamat Redaksi

Gedung Djuanda 1 Lantai 9,
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta
Telp (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330
E-mail mediakeuangan@kemenkeu.go.id

Ikuti Kami

www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id
[majalahmediakeuangan](#)
Media Keuangan Podcast
Kementerian Keuangan RI/Playlist MK

Daftar Isi

DARI LAPANGAN BANTENG

03 Bersiap Hadapi Tantangan

Jadi Peluang

PHOTOSTORY

06 Menuju Sejarah Baru

08 Lok Baintan

FLASHBACK

10 Flashback 2022

LAPORAN UTAMA

12 Kinerja APBN Di Tengah

Dinamika Tahun 2022

20 Percepat Langkah Menuju Pusat

Halal, Ini Strategi Indonesia!

28 Inovasi APBN Memitigasi

Bencana

36 Ekonomi Indonesia: Bertahan

Dalam Himpitan Global

44 APBN 2023: Optimis dan Waspada

52 Perhelatan G20 dan Beragam

Manfaat Bagi Dunia

POTRET KANTOR

60 Damai di Sumba

GENERASI EMAS

60 Umar Syaroni Tunadaksa Master

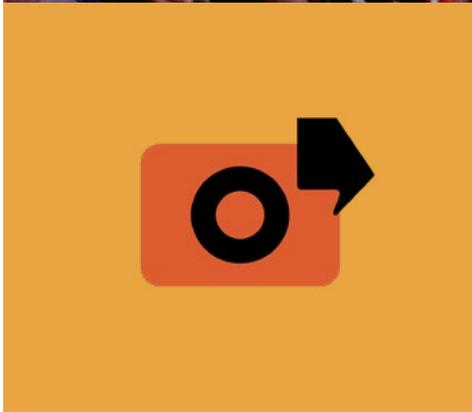
Komunikasi

KOMIK

68 Pak Maman Jojo



08



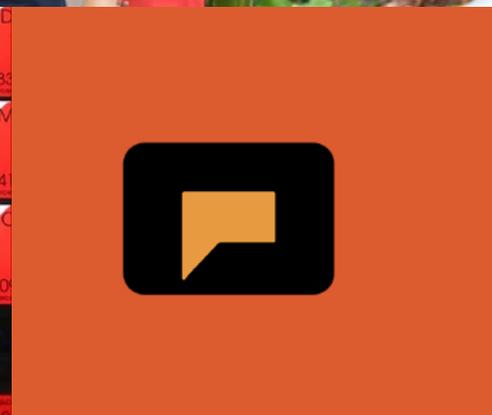
12



16



22



28



32



Podcast Media Keuangan

Dengarkan serunya
wawancara bersama
para narasumber pilihan
Media Keuangan



DARI LAPANGAN BANTENG

Bersiap Hadapi Tantangan Jadi Peluang

Momen akhir tahun biasanya menjadi kesempatan bergabung bersama orang-orang terkasih untuk merayakan pergantian tahun. Waktu spesial ini bahkan menjadi keleluasaan untuk berkumpul dengan keluarga. Berbagai aktivitas yang menyenangkan biasanya sudah disiapkan. Mulai dari kegiatan makan bersama, liburan, hingga kegiatan perayaan lainnya. Demikian pula di lingkungan kerja, akhir tahun juga menjadi saat di mana dilakukan perayaan penutupan. Mulai dari tutup buku, tutup kas, hingga penutupan capaian kerja.

Sampai dengan penghujung tahun 2022 berdasarkan data resmi di portal covid19.go.id, jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia 6,7 juta* dengan jumlah kesembuhan mencapai 6,5 juta. Angka ini tentu menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Setelah mulai kian teruji mengelola krisis pandemi, guncangan kembali menyapa dengan adanya konflik perang antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga komoditas pangan dan energi, baik akibat disrupsi rantai pasok maupun perang, berimbas pada lonjakan inflasi global.

Meski sempat terhantam syok, perekonomian nasional di 2022 tetap dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5 persen. Inflasi juga relatif moderat dibandingkan negara-negara lain tercatat di level 5,71 persen (yoy) pada Oktober 2022. Di sisi lain, neraca perdagangan bertahan surplus dalam tiga puluh bulan berturut-turut.

Bahkan di 2022 dan di tengah pandemi yang berlangsung serta konflik geopolitik, Indonesia berhasil menjalankan fungsi Presidensi G20. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 15-16 November 2022 di Bali diselenggarakan dengan lancar dan menjadi puncak rangkaian pertemuan G20 Presidensi Indonesia. Indonesia pun berhasil mengesahkan G20 Bali

Leaders Declaration dan menghasilkan kesepakatan konkrit. Mulai dari kesepakatan pajak internasional, pembentukan dana pandemi, penguatan sistem pangan global, hingga peralihan ke energi bersih (ETM).

Dari seluruh potongan-potongan cerita di 2022 itu, berbagai cobaan dan tantangan mampu dilewati dengan keberhasilan. Tahun lalu menjadi bukti kinerja solid APBN 2022 dan Kemenkeu sebagai punggawa pengawal keuangan negara dapat terus mendukung optimisme pemulihan ekonomi Indonesia.

Menutup akhir tahun 2022, dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan yang mengisyaratkan kemungkinan Indonesia mampu keluar dari situasi pandemi Covid-19 dan akan memasuki periode endemik di tahun depan.

Desain APBN 2023 pun dirancang dengan semangat optimisme. Namun, optimisme ini akan dibarengi dengan kewaspadaan karena bayang-bayang ketidakpastian masih akan terus hadir. APBN 2023 tetap mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023.

Kemantapan untuk melalui tahun 2023 tak akan melengahkan pemerintah untuk terus sigap mewaspada hal-hal yang tak terduga. Sama seperti apa yang disampaikan Presiden, "Situasinya sangat sulit diprediksi. Sulit dihitung dan teori-teori standar. Semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi karena semuanya sekarang ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada". Dengan peran APBN sebagai *shock absorber* atau peredam guncangan, tentu kita sama-sama berharap proses tahun 2023 dapat kita lalui dengan baik dan bahkan menjadi peluang untuk maju. Selamat tahun baru!

Tim Redaksi Media Keuangan

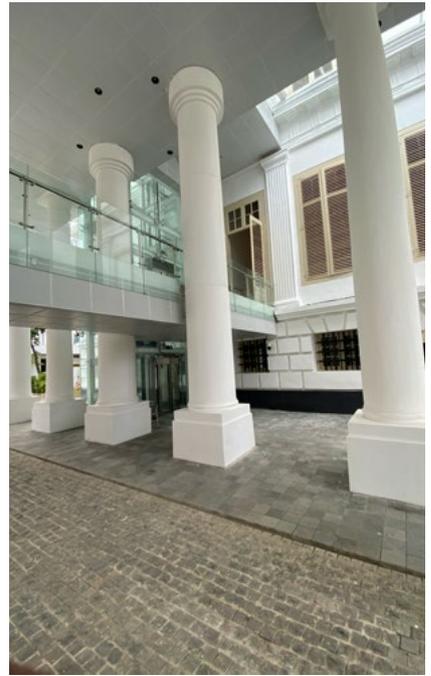


PHOTO STORY

Menuju Sejarah Baru

Proses pemugaran Gedung AA Maramis yang dimulai sejak 2019 telah hampir selesai sepenuhnya. Perencanaan dan pekerjaan konstruksi pemugaran dilaksanakan secara ketat dan memperhatikan kaidah konservasi cagar budaya. Ke depannya, bangunan cagar budaya tersebut akan dimanfaatkan sebagai preservasi artefak keuangan negara sekaligus sarana edukasi pengelolaan keuangan negara dari masa ke masa dalam bentuk Museum dan Perpustakaan Keuangan Negara.

Foto: Dok. Biro KLI





Lok Baintan

Foto: Irfan Bayu P



Seperti aliran darah pada tubuh manusia, Sungai Martapura mengalirkan sebagian besar kegiatan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Butuh waktu sekitar 30 menit dari pusat kota menggunakan kapal kelotok (sampan bermesin) menyusuri Sungai Martapura untuk menuju Pasar Terapung Lok Baintan. Tempat itu adalah sebuah pasar tradisional yang berlokasi di desa Sungai Pinang (Lok Baintan), Kecamatan Sungai Tabuk, Banjar. Saat mentari belum sepenuhnya muncul, para pedagang sudah berkonvoi, berkelompok menuju Lok Baintan dari berbagai penjuru aliran sungai. Di atas perahu jukung (perahu kecil

tradisional banjar) para pedagang menjual beragam dagangan seperti sayuran, buah, kue tradisional dan lain-lain. Aktivitas perdagangan yang didominasi perempuan banjar dengan gaya khas mereka ini dimulai pada pukul enam pagi sampai kira-kira pukul 09.30 WITA. Uniknya di pasar ini masih berlaku sistem barter, selain jual beli menggunakan uang yang biasa kita temui. Selain jadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, Lok Baintan telah tersohor menjadi salah satu pusat tujuan wisata bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara serta jadi unggulan promosi pemerintah daerah setempat.

03 Januari 2022

Press Conference
realisasi APBN 2021



18 Januari 2022

Rapat Paripurna DPR
RI tentang RUU IKN



10 Februari 2022

BRI Microeconomic
Outlook 2022



03 Maret 2022

Sosialisasi UU
HPP Semarang,
Jawa Tengah



17 Februari 2022

1st FMCBG



Flashback 2022

25 Maret 2022

Sosialisasi UU
HKPD di Riau



12 Juni 2022

LKPP dapat WTP dari
BPK



03 Maret

Raker bersama komisi
I DPR RI



14 April 2022

Penandatanganan
Perjanjian Induk INA
dan Waskita dan HK
dengan disaksikan
Presiden RI



20 Mei 2022

Penyampaian
KEM PPKF Tahun
Anggaran 2023



19 Mei 2022

Rapat Kerja
Badan Anggaran
DPR RI



1 Juli 2022

Konferensi
Pers Program
Pengkungkapan
Sukarela



16 Juni 2022

Pengarahan Pejabat
Gubernur dan Bupati





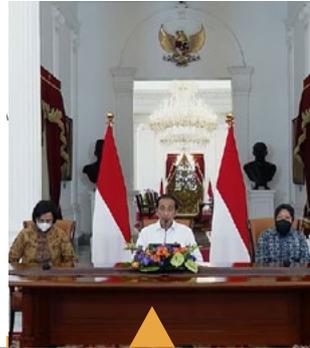
13 Juni 2022

Leader's Insight Side Event G20 Rate"



21 Juli 2022

Wonder Trip, Main ke Kantor Menteri Keuangan



16 Agustus 2022

Pidato Kenegaraan dan Pidato Nota Keuangan



17 Agustus 2022

Upacara HUT RI



3 September 2022

Pengalihan BBM bersubsidi



06 September 2022

Rapat Paripurna P2 APBN 2021



29 September 2022

DPR saakan RUU APBN 2023 menjadi UU



11 Oktober 2022

Pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers (JFAMM)



28 Oktober 2022

Peluncuran Aplikasi Kemenkeu Satu



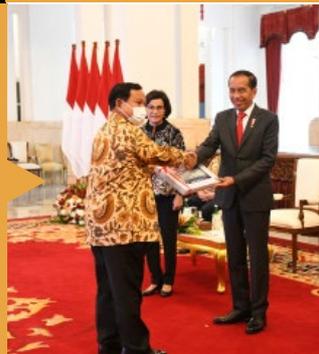
29 September 2022

Pijar Foundation's Global Future Fellows



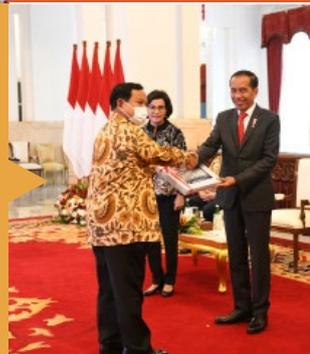
1 Desember 2022

Penyerahan DIPA di Istana



15 Desember 2022

Pengesahan UU PPSK



12 November 2022

Join Finance and Health ministers Meeting



15 November 2022

KTT G20



30 Desember 2022

Penutupan Kas Tahun 2022

Laporan Utama



Sejak awal tahun 2022, pemerintah optimis kinerja perekonomian tahun 2022 semakin kuat

Foto: Irfan Bayu P

LAPORAN UTAMA

Kinerja APBN di Tengah Dinamika Tahun 2022

Oleh: Reni Saptati D.I.

Pada awal tahun 2022, kinerja ekonomi Indonesia diproyeksikan semakin kuat dibanding tahun sebelumnya. Namun, gelombang Omicron datang dan gejolak geopolitik Rusia-Ukraina terjadi. APBN tetap menjalankan perannya secara optimal di tengah dinamika tahun 2022.



Foto: Irfan Bayu P



Pemerintah masih menyiagakan belanja APBN tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi

eski mendapat gempuran varian Delta dan berbagai tekanan lainnya, ekonomi Indonesia tahun 2021 secara luar biasa mampu tumbuh 3,69 persen. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun, menjadi angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan melampaui level periode sebelum pandemi.

Berkaca dari kinerja perekonomian tahun 2021 tersebut, sejak awal tahun 2022 pemerintah optimis kinerja perekonomian tahun 2022 semakin kuat. Ekonomi diproyeksikan mampu tumbuh 5,2 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu pada bulan Februari 2022 memperkirakan penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menyokong kinerja ekonomi tahun itu.

“Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya

pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif,” ucap Febrio kala itu.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengungkapkan percepatan pemulihan ekonomi juga didorong oleh kenaikan laju investasi.

“Secara keseluruhan, total realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai Rp901,02 triliun, melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN, yaitu 104 persen,” ujar Riefky.

Perbaikan neraca perdagangan di masa pandemi Covid-19 berdampak positif pada transaksi berjalan

yang mencapai surplus tertinggi sepanjang masa pada triwulan III 2021 yaitu sebesar US\$4,5 miliar atau 1,49 persen dari PDB. Angka surplus ini tercatat sebagai nilai tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Indonesia sebelumnya selalu mengalami defisit transaksi berjalan.

“Surplus dalam transaksi berjalan diperkirakan akan bertahan hingga triwulan I 2022, tetapi dengan surplus yang lebih rendah karena harga komoditas yang sebelumnya melonjak mulai kembali normal,” ungkap Riefky pada Februari 2022.

Omicron melanda

Sejak Januari 2022 kasus Covid-19 kembali menanjak seiring munculnya varian Omicron. Pemerintah pun memutuskan untuk menerapkan kembali PPKM Level III di beberapa wilayah yang mengalami lonjakan kasus Omicron. Di samping mewaspadai potensi risiko dari sisi domestik, pemerintah juga bersiap menghadapi beragam potensi risiko global agar momentum penguatan pemulihan ekonomi tetap bisa terjaga.

Menyikapi merebaknya gelombang ketiga Covid-19 atau varian Omicron, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Abdurrohman pada bulan Februari 2022 menyampaikan strategi penanganan gelombang Omicron berbeda dengan gelombang Delta. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan karakter antara varian Omicron dan Delta serta capaian tingkat vaksinasi Covid-19.

“Aspek penanganan sisi kesehatan akan selalu menjadi prioritas untuk mengantisipasi risiko terjadinya peningkatan kasus kembali di masa yang akan datang,” ujar Abdurrohman.

Menghadapi risiko ketidakpastian Covid-19 yang masih eskalatif, Abdurrohman mengatakan pemerintah masih menyiagakan belanja APBN tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Selain melanjutkan agenda reformasi struktural, pemerintah juga meneruskan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Di tahun ini alokasi untuk Program PEN sekitar Rp455,62 triliun, termasuk untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi terutama dalam kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja,” terangnya.

Tren pemulihan berlanjut

Cerita positif APBN pada 2021 konsisten berlanjut pada triwulan pertama 2022 meski Omicron melanda. Hingga akhir Maret 2022 APBN tercatat surplus Rp10,3 triliun atau 0,06 persen PDB. Tumbuh 107,2 persen dibandingkan periode sama di tahun 2021 yang defisit sebesar Rp143,7 triliun. Bahkan dengan surplus tersebut masih tersisa anggaran lebih sebesar Rp149,7 triliun. Dengan posisi surplus tersebut, pembiayaan utang pun merosot tajam sebesar 58,1 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2022 (20/4/2022) mengungkapkan prestasi tersebut menunjukkan kerja keras APBN dalam menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi sudah mulai terlihat buahnya.

“Ekonominya sudah mulai bantu rakyat meskipun tetap masih menghadapi tekanan, APBN tetap hadir sebagai bantalan atau tadi *shock absorber*. Namun APBN-nya sendiri juga mulai mengalami perbaikan



Sejak awal tahun 2022, pemerintah optimis kinerja perekonomian tahun 2022 semakin kuat



Foto: Irfan Bayu P

REALISASI

APBN 2022

s.d 14 Desember 2022

REALISASI PENDAPATAN
NEGARA

Rp2.479,9 T

(naik 36,9% yoy)

Penerimaan Pajak: Rp1.634,4 T

Kepabeanan dan Cukai: Rp293,1 T

Penerimaan Negara Bukan Pajak: Rp551,1 T

REALISASI PENDAPATAN
NEGARA

Rp2.717,8 T

(naik 11,9%)

Belanja Pemerintah Pusat: Rp1.967,9 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Rp749,7 T

kesehatannya. Jadi tadi melindungi masyarakat tetap jalan, pemulihan ekonomi tetap terjaga. APBN sehatnya juga mulai terwujudkan,” ucap Sri Mulyani.

Seiring dengan semakin menurunnya kasus harian Covid-19, mobilitas masyarakat terus naik hingga 7,1 pada kuartal I-2022, berada pada level di atas pra-pandemi. Tren yang sama juga terlihat pada Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang tetap tinggi di atas 14 persen. Serta Mandiri Spending Indeks yang berada pada level 129,4.

“Ekonomi Indonesia dan momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik, dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan terus meningkat, terutama menjelang Idul Fitri, di mana mobilitas akan meningkat. Mobilitas telah menunjukkan peningkatan secara konsisten di kuartal I-2022 dan disertai kegiatan konsumsi mereka,” jelas Sri Mulyani.

Momentum pemulihan ekonomi yang terjaga dengan baik meski berada di tengah tantangan domestik maupun global, berdampak positif terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang konsisten tumbuh positif sejak April 2021.

Penerimaan pajak kuartal I-2022 mencapai Rp322,46 triliun atau tumbuh masih sangat tinggi sebesar 41,36 persen (yoy) dan mencapai 25,49 persen dari target APBN 2022.

Sri Mulyani menjelaskan penerimaan pajak yang tinggi ini tidak hanya berhubungan dengan *windfall* atau adanya kenaikan komoditas. Namun, didukung juga oleh hasil implementasi kebijakan pemulihan ekonomi sebagai fondasi yang kuat.

Tekanan global menguat, APBN tetap prima

Di tengah upaya pemerintah dalam mendorong proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terdapat berbagai tantangan yang muncul terutama dari sisi eksternal. Kondisi ekonomi global menghadapi tekanan yang kompleks akibat konflik antara Rusia dan Ukraina yang terus mengalami eskalasi. Hal ini pun berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan yang diproyeksikan oleh beberapa lembaga dunia.

“Kondisi ekonomi global menghadapi tekanan dari terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina dengan tensi geopolitik yang meningkat. Ini menimbulkan tekanan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam

pertemuan musim semi ini, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Rabu, 20 April 2022.

Dalam paparannya pada acara CORE Quarterly Review 2022 pada April 2022, Moh. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia mengatakan bahwa sebelum adanya konflik Rusia dan Ukraina pertumbuhan ekonomi dunia sudah diproyeksikan melambat 1 persen dibanding tahun 2021. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akan lebih signifikan lagi setelah terjadinya konflik.

“Jadi akhir tahun lalu sudah diproyeksi pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat dibanding 2021. Sebelum konflik, ekonomi diproyeksi melambat 1 persen dari 5,9 ke 4,9. Proyeksi OECD setelah konflik bisa mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia lebih dari 1 persen,” papar Faisal.

Namun demikian, APBN mampu menjalankan perannya sebagai *shock absorber* di tengah tekanan global. Dari sisi belanja perlindungan sosial, selama tiga

tahun berturut-turut memang mengalami kenaikan. Hal ini merupakan bentuk dari peran APBN sebagai *shock absorber* atau bantalan dalam melindungi ekonomi masyarakat.

“Belanja barang untuk PC-PEN dalam hal ini terutama ditujukan untuk bantuan tunai untuk 491,1 ribu pedagang kaki lima, warung dan nelayan senilai Rp300 miliar. Selain itu, alokasi belanja sebesar Rp500 miliar diberikan untuk membayar biaya perawatan 7,1 ribu pasien Covid-19,” jelas Menkeu.

Menkeu memaparkan realisasi anggaran dari sisi belanja negara. Hingga Maret 2022 capaian belanja sebesar Rp490,6 triliun atau 18,1 persen dari total pagu belanja. Untuk belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp150 triliun atau 15,9 persen dari APBN, untuk belanja nonkementerian dan lembaga mencapai 164,2 triliun atau 16,4 persen. Realisasi belanja yang menurun terutama di sisi belanja kesehatan menggambarkan bahwa Covid-19 sudah mulai mereda. Meski demikian, anggaran untuk penanganan Covid-19 masih tetap dialokasikan.



APBN mampu menjalankan perannya sebagai *shock absorber* di tengah tekanan global

Foto: Irfan Bayu P



Kondisi Indonesia masih relatif resilien dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tetap di 5,3%

Foto: Irfan Bayu P

Indonesia relatif resilien

Hingga triwulan IV 2022, ekonomi global masih belum cukup baik. Beberapa negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa mengalami inflasi yang tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia juga dikoreksi ke bawah. Untuk tahun 2022, proyeksi dari World Economic Outlook IMF hanya 3,2 persen dan tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7 persen. Dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan.

Namun demikian, kondisi Indonesia masih relatif resilien dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tetap di 5,3 persen dan proyeksi di tahun 2023 berada pada angka 5,0 persen. Dari kinerja APBN hingga kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi Indonesia

masih kuat. Penerimaan negara masih tinggi dan ini memperlihatkan pemulihan ekonomi yang terus terjaga, kontribusi harga komoditas yang masih di level relatif tinggi serta dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah.

Hingga September 2022 penerimaan pajak tumbuh 54,2 persen atau mencapai Rp1.310,5 triliun (88,3 persen dari target). Mayoritas jenis pajak juga menunjukkan kinerja yang baik di mana beberapa di antaranya sudah hampir mendekati target 100 persen dari pagu. Untuk PPh nonmigas dan PPh migas berturut-turut berada pada angka Rp723,3 triliun (96,6 persen dari target) dan Rp62,3 triliun (96,4 persen dari target). Besar potensi kedua jenis pajak ini akan mencapai atau bahkan melebihi target. Sementara, untuk PPN dan PPNBM sudah mencapai 78,9 persen serta PBB dan Pajak Lainnya juga diperkirakan dapat mencapai target jika terus diakselerasi.



Pada 21 Desember 2022, Menkeu Sri Mulyani saat menjadi panelis dalam diskusi dengan tema Perekonomian Indonesia 2023 menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, fiskal-moneter, dan sektor keuangan secara umum. Menkeu menyebut bahwa penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Namun, Menkeu juga mengatakan bahwa Indonesia tetap perlu memiliki kewaspadaan terhadap kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat geopolitik yang belum stabil.

Dalam konferensi pers APBN Kita yang diselenggarakan pada 20 Desember 2022, Menkeu menerangkan hingga 14 Desember 2022, penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun. Kinerja perpajakan

ini menembus 110,06 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yakni Rp1.485 triliun, juga tumbuh 41,93 persen dibandingkan penerimaan tahun lalu yang mencapai Rp1.151,5 triliun.

Menurut Menkeu, kenaikan yang sangat tinggi ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik, pemulihan ekonomi yang baik, komoditas yang juga meningkat, dan juga karena adanya reformasi dari legislasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Kenaikan yang sangat tinggi ini akan menjadi modal kita untuk menjaga agar APBN menjadi makin sehat, sehingga APBN bisa melindungi masyarakat, melindungi ekonomi, dan terus mendukung pembangunan Indonesia,” pungkas Menkeu.

Laporan Utama



Indonesia sebagai rumah bagi pasar domestik ekonomi halal terbesar di dunia

Foto: Arief Kuswanadji

LAPORAN UTAMA

Percepat Langkah Menuju Pusat Halal, Ini Strategi Indonesia!

Oleh: Yani Kurnia Astuti

Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Sebuah visi besar yang ingin diwujudkan pemerintah. Sebagai negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia yakni 267 juta penduduk dan dengan mayoritas penduduk adalah muslim, Indonesia berpotensi kuat untuk mencapai visi tersebut. Pemerintah pun terus mendorong pengembangan industri halal di Indonesia secara berkelanjutan.

Potensi industri halal Indonesia

Memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sebanyak 229.6 juta orang di 2020, menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi pasar domestik ekonomi halal terbesar di dunia.

Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/2022 mencatat belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar US\$184 miliar dan diprediksi dapat mencapai US\$281.6 miliar di 2025.

Sementara Bank Indonesia mencatat saat ini pertumbuhan sektor rantai nilai halal mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion Muslim, dan pariwisata ramah Muslim mencapai 25,4 persen PDB nasional. Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar mengatakan pertumbuhan tersebut dapat lebih ditingkatkan bahkan hingga lebih dari 50 persen.

“Caranya, kegiatan produksinya kita perbesar, belanja impornya kita kurangi. Harapannya, Indonesia sendiri konsumsinya ditopang dari produk halal produksi dalam negeri,” ungkap Afdhal.

Sementara itu, dari sisi global, berdasarkan The State of Islamic Global Economy Report 2021 belanja konsumen muslim untuk produk gaya hidup (makanan, *fashion*, perjalanan, media/rekreasi, dan farmasi/kosmetika) pada 2020 tercatat senilai US\$1.9 triliun. Besarnya potensi pasar ekonomi halal baik domestik maupun global tersebut membuka peluang bagi para pelaku industri halal untuk mendorong pertumbuhan produksi dan menjadi pemain kunci dalam industri halal global.

Bicara mengenai posisi ekonomi halal Indonesia di kancah global, saat ini Indonesia berada di posisi keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang menempati peringkat tiga besar. Afdhal



Pemerintah telah menyusun 13 program prioritas termasuk pengembangan industri produk halal

Foto: Arief Kuswanadji



Indonesia berpeluang besar untuk naik peringkat.

“Industrialisasi produk halal adalah kata kunci untuk bisa meningkatkan posisi Indonesia dalam kancah perdagangan produk halal dan industri produk halal global,” Afdhal menjelaskan.

Pemerintah melalui KNEKS telah menyusun 13 program prioritas termasuk untuk pengembangan industri produk halal. Di antaranya berupa kodifikasi produk halal dan penyusunan *masterplan* industri produk halal. Selain itu, pembentukan *task force* percepatan implementasi sertifikasi halal usaha mikro dan kecil, riset, dan inovasi produk halal berbasis teknologi juga telah diterapkan.

Pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen

Sertifikasi halal penting dalam memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen. Untuk mengetahui sebuah produk itu halal atau tidak bukan sekadar melihat produk akhirnya semata. Konsumen juga ingin mengetahui bagaimana prinsip halal diterapkan dalam proses menghasilkan produk tersebut mulai dari penyediaan bahan, pemrosesan, pengemasan, hingga penyajian.

Menurut Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyl Center (IHLC) sertifikasi halal diperlukan sebab persoalan *halal toyyiban* menjadi satu kesatuan proses. Halal biasanya sifatnya normatif atau *lawful*, sementara *toyyiban* memastikan bahwa produk memiliki kualitas. Halal adalah proses dan bukan sekedar *end product*. Sebagai contoh, konsumen ingin mengetahui proses *halal supply chain* dari suatu produk mulai dari peternakannya hingga produk yang dijual di toko.

“Semisal ayam, saat di peternakan bagaimana makanan yang diberikan, apa dikasih makan atau vitamin yang tidak sejalan dengan syariat? Lalu bagaimana cara potongnya? Begitu juga jika diolah lagi menjadi produk campuran seperti perkedel, apa saja campurannya? Nah, itu yang disebut dengan sertifikasi halal, harus terlihat prosesnya. Maka, dengan logo halal tersebut konsumen pun merasa terproteksi,” jelas Sapta.

Hal senada juga diungkap oleh Aqil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



Sertifikasi halal penting dalam memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen.

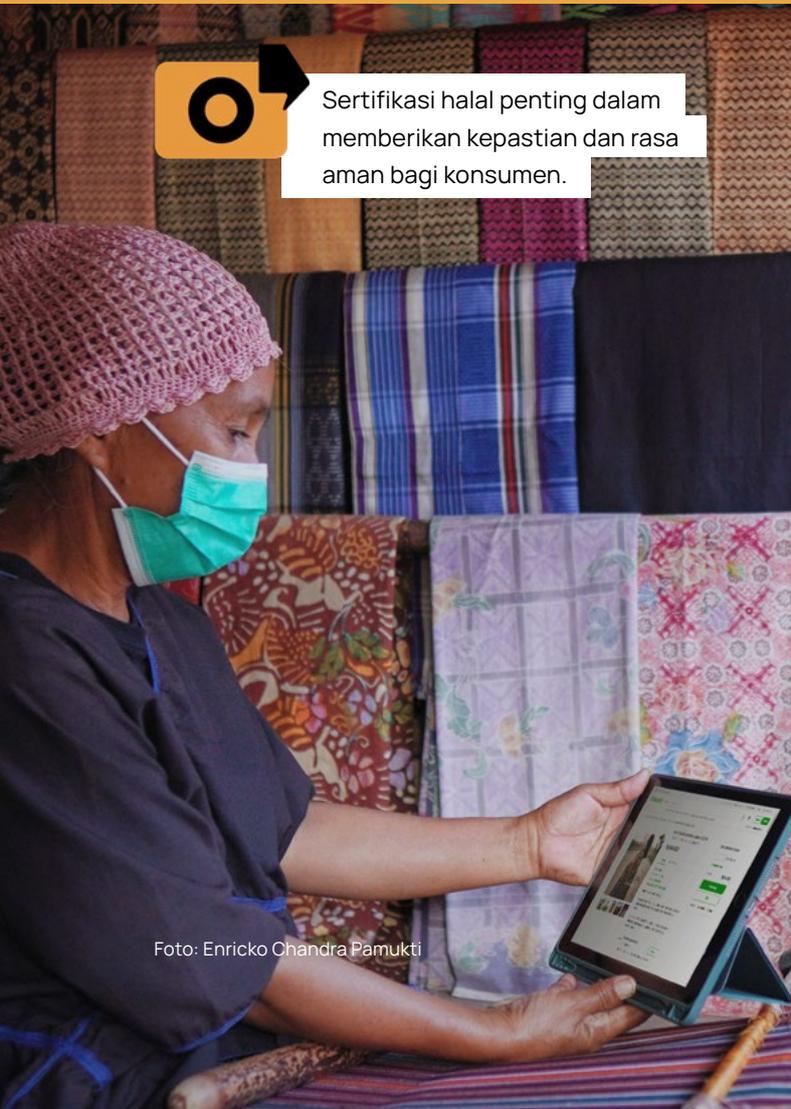


Foto: Enricko Chandra Pamukti

TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

Tarif Berlaku Mulai 1 Desember 2021

PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA
(SELF DECLARE)

Rp0,-

Biaya pendaftaran, penetapan, dan sertifikasi halal sebesar Rp300.000,00 dibebankan pada:

APBN/APBD

Fasilitas Lembaga Negara/ Swasta

REGULER

Rp300.000 Pendaftaran, penetapan, dan Sertifikasi Halal

Rp350.000 Biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH

Menurutnya, sertifikasi halal memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen.

“Konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi, memakai, menggunakan, memanfaatkan produk-produk maupun jasa-jasa layanan yang dijamin kehalalannya. Sertifikasi halal memberikan jaminan dan perlindungan untuk itu,” tambahnya.

Sertifikasi halal nol rupiah

Guna mendorong perluasan sistem jaminan halal, pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal Rp0 (nol rupiah) untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mencakup tarif layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku UMK, tarif perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk.

Beleid tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Kementerian Agama.

Afdhal menjelaskan fasilitas sertifikasi halal nol rupiah yang sudah diluncurkan oleh BPJPH ini berlaku melalui proses sertifikasi nonaudit, dengan kata lain tidak melalui pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal atau audit. Hal tersebut untuk memudahkan pelaku UMK.

Pelaku UMK cukup melakukan pernyataan mandiri atau *self declare* mengenai kehalalan kandungan produk mereka. Program pernyataan pelaku usaha ini lanjut Afdhal membutuhkan pendampingan di mana pendamping dengan kualifikasi yang telah ditentukan bertugas melakukan verifikasi.

Pendamping tersebut menurut Afdhal bisa berasal dari berbagai organisasi. Bisa dari jajaran BPJPH sendiri di jaringan Kementerian Agama, lembaga organisasi Islam, universitas, lembaga riset, asosiasi masyarakat yang melakukan pendampingan UMKM, pemerintah daerah, dan juga dari Balai-balai pendidikan atau pelatihan yang ada di seluruh pelosok Indonesia.

“BPJPH sendiri berkomitmen untuk membentuk kurang lebih minimal 100.000 pendamping untuk sertifikasi halal UMK se-Indonesia,” ungkap Afdhal.

Keberhasilan program sertifikasi nol rupiah ini lanjut



Akselerasi sertifikasi halal beri manfaat bagi pelaku usaha

Afdhal akan sangat dipengaruhi oleh pensertifikasian halal produk-produk hulu. Apabila produk di hulu atau bahan mentah yang digunakan untuk produk dengan mudah bisa dideteksi kehalalannya maka jauh lebih mudah untuk kemudian bisa melakukan verifikasi kehalalan dari produk UMK.

Percepatan implementasi sertifikasi halal UMK juga dilakukan melalui pembentukan *task force* (gugus tugas) lintas kementerian/lembaga.

“Kementerian yang memiliki binaan UMKM, program pembinaan untuk mikro dan kecil, pemerintah daerah yang tadi *men-support* usaha mikro dan kecil berkembang di tempatnya, harus kita kolaborasikan dalam bentuk *task force* yang lebih konkrit, *task force* yang kerjanya lebih cepat dan juga kita harapkan bisa melakukan sertifikasi halal dalam jumlah yang masif,” papar Afdhal.

Sertifikasi halal Afdhal mengatakan tidak hanya merupakan jaminan bahwa pelaku UMK memproduksi produk yang halal, tapi melalui sertifikasi ini juga akan membantu pelaku UMK untuk bisa naik kelas. Dengan kualitas produk yang semakin baik dan terjamin kehalalannya maka pemasaran produk bisa semakin luas.

Akselerasi sertifikasi halal beri manfaat bagi pelaku usaha

Selain konsumen, percepatan implementasi sertifikasi halal tentu saja berdampak positif bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tidak hanya kemudahan mengurus sertifikasi, tetapi juga memberikan potensi tambahan pendapatan bagi pelaku usaha.

“Proses sertifikasi yang dulu masih sering dikeluhkan durasinya yang cukup lama. Begitu juga dengan sertifikasi industri kecil, besar dan seterusnya. Nah,



Indonesia telah memancang target menjadi produsen halal terkemuka dunia

Foto: Resha Aditya

dengan aturan yang sekarang ini jadi semakin tertib dan transparan,” tutur Sapta.

Sapta juga mengungkapkan pengalamannya berdiskusi dengan pelaku usaha terkait manfaat sertifikasi halal tersebut.

“Saya pernah makan di restoran sebuah hotel dan melihat pengumuman bahwa di sana makanan dan minumannya 100 persen halal. Saat saya tanyakan alasannya, *chef* di restoran tersebut menjawab bahwa lebih banyak konsumen yang menanyakan makanan halal daripada nonhalal. Ini berarti memperlihatkan bahwa dari perspektif bisnis, sertifikasi halal juga akan memberikan tambahan pendapatan atau *extended profit*,” tambahnya.

Menurut Aqil, dari sisi pelaku usaha animo untuk mengurus sertifikasi halal cukup baik. Namun, pelaku usaha masih perlu terus diedukasi bahwa sertifikasi ini bukan administrasi semata, tetapi juga menjadi sebuah standar yang berlaku baik nasional maupun global. Tentu saja, ini akan membawa dampak bagi perdagangan dan perekonomian sebuah negara.

Pengembangan ekosistem industri halal

Potensi dan perkembangan industri halal di Indonesia menjadi angin segar dalam pengembangan ekonomi syariah di negeri ini. Dalam tiga dekade terakhir, sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus bertumbuh. Pandemi Covid-19 pun tak menahan laju pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Di sisi lain, dukungan dari pemerintah terus menguat antara lain melalui penerbitan berbagai regulasi, termasuk regulasi jaminan produk halal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Indonesia bahkan telah memancang target menjadi produsen halal terkemuka dunia. Visi sebagai pusat halal dunia dilakukan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan diharapkan mampu memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.



Pembangunan industri halal diprediksi mampu memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional

Foto: Shutterstock

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan bahwa Rapat Pleno KNEKS Semester I 2022 berfokus pada percepatan dan pelaksanaan program-program strategis sektor ekonomi dan keuangan syariah. Ia mengungkapkan program-program tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dan tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja.

“Contohnya pembangunan kawasan ekonomi atau industri syariah. Yang menarik, kita juga meluncurkan dua inisiatif Kawasan Industri Halal yang sudah ada di Sidoarjo dan Cikarang. Sekarang beberapa gubernur melaporkan bahwa mereka ingin juga membangun Kawasan Industri Halal,” tutur Menteri Keuangan.

Pengembangan industri halal berbasis regional sesuai dengan karakteristik dan *comparative advantage* masing-masing daerah. Kehadirannya di berbagai daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi daerah. Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk menciptakan iklim pengembangan industri halal yang kondusif di daerahnya masing-masing.

Sri Mulyani juga mengatakan pembangunan industri

halal diprediksi mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam konferensi pers usai rapat pleno, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerangkan pemerintah akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di semua provinsi sebagai perpanjangan dari KNEKS di tingkat pemerintah pusat.

“Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi,” tegas Ma'ruf Amin. Ia menjelaskan saat ini KDEKS sudah hadir di provinsi Sumatera Barat. KDEKS juga akan segera terbentuk di Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dengan adanya KDEKS, diharapkan koordinasi antara daerah dengan kementerian/lembaga menjadi makin baik. Salah satu bentuk program layanan syariah yang sudah berjalan adalah jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi Aceh.

“Komite daerah yang sudah dan akan dibentuk ini akan makin mempercepat dan memberikan dukungan yang lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan,” pungkas Sri Mulyani.



Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar

LAPORAN UTAMA

Inovasi APBD Memitigasi Bencana

Oleh: Resha Aditya Pratama

Potensi bencana alam Indonesia sangat besar. Segala kondisi geografis negeri ini mendatangkan risiko terjadinya ribuan bencana alam yang tak terelakkan. Ancaman bencana akan selalu ada. Intensitas bencana yang tinggi setiap tahun di Indonesia memerlukan kesiagaan dalam segala bentuk, termasuk kesiapan pendanaan. Pendanaan penanggulangan bencana dapat bersumber dari APBD, APBD, dan/atau masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar. Posisi Indonesia terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergeseran lempeng tektonik itu bisa menimbulkan gempa bumi. Terakhir, pada 21 November lalu gempa bumi dengan skala magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Cianjur Jawa Barat dan menyebabkan 635 orang meninggal, 593 orang mengalami luka berat, 114.683 warga terpaksa mengungsi, serta setidaknya 56.548 rumah rusak.

Bencana juga rawan terjadi karena Indonesia termasuk dalam kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Sekitar 90 persen gempa bumi terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik dengan 81 persen gempa di jalur Cincin Api tersebut merupakan gempa terbesar di dunia. Sementara dari letak astronomis, Indonesia

yang dilintasi garis khatulistiwa mengalami terpaan El Nino dan La Nina yang menyebabkan kerentanan akan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Bahkan data World Risk Index Tahun 2021 juga menunjukkan posisi Indonesia yang berada pada peringkat ke-3 dari 192 negara rentan bencana.

Segala kondisi tersebut mendatangkan risiko terjadinya ribuan bencana alam yang tak terelakkan. Per 25 Desember 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.461 kejadian bencana alam telah melanda berbagai wilayah di Indonesia selama tahun 2022.

Bencana alam berupa banjir menempati posisi teratas dalam bencana yang paling sering terjadi di tahun 2022 yakni mencapai 1.493 peristiwa dan dilanjutkan cuaca ekstrem sebanyak 1.033 kejadian, tanah longsor 628



Pemerintah menyadari betapa rentannya Indonesia terhadap bencana

Foto: Irfan Bayu P

peristiwa, gempa bumi 28 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 24 kejadian, kekeringan 4 kejadian, serta erupsi gunung berapi 1 kejadian.

Skema anggaran bencana

Ancaman bencana akan selalu ada. Pemerintah pun menyadari betapa rentannya Indonesia terhadap bencana. Ada tiga tahapan dalam mekanisme penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU 24/2007 dan PP 22/2008 yaitu tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan pengelolaan risiko bencana di setiap tahap penanggulangan bencana tersebut. Pemerintah memastikan kesiapan dana dalam setiap fase penanganan bencana melalui APBN kita.

Pada fase prabencana, pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi bencana untuk kementerian/lembaga yang terlibat penanggulangan bencana seperti BNPB, Kementerian PUPR, Kemensos, dan K/L teknis lainnya.

Ketika bencana terjadi atau pada fase tanggap darurat, pemerintah mengalokasikan dana siap pakai (*on call*) melalui BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dana ini dimanfaatkan antara lain untuk penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan segera sarana prasarana vital. Contohnya pemasangan tenda, pembuatan dapur umum, pembangunan MCK, hunian sementara. Dana *on call* ini dialokasikan setiap tahun dan berada di bawah pengelolaan BNPB.

Tahap selanjutnya adalah tahap pascabencana atau fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan melalui hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah.

Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mulai dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2015, dan sampai dengan tahun 2021 telah dialokasikan sebesar Rp9,992 triliun. Dengan total realisasi penyaluran senilai Rp9,713 triliun kepada lebih dari 387 pemerintah daerah. Output hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat terdampak. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, drainase, sekolah, puskesmas, dan relokasi rumah penduduk merupakan beberapa contoh hasil nyata hibah tersebut.



Foto: Irfan Bayu P



Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat terdampak.

Dari reaktif ke proaktif

Penanggulangan bencana di Indonesia semakin tahun pun semakin menantang dan bertambah kompleksitasnya. Hal ini disebabkan dari semakin beragamnya jenis, frekuensi serta dampak bencana yang terjadi baik dari aspek kemanusiaan maupun ekonomi.

“Selain bencana alam, kita juga tak jarang menghadapi bencana nonalam. Contohnya pandemi ini masuknya kategori bencana nonalam. Lalu bencana sosial akibat konflik antar kelompok masyarakat. Bencana-bencana tersebut tidak hanya memakan korban, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Misalnya, gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004. Dahsyatnya bencana alam tersebut memakan korban jiwa sebanyak 230.000 jiwa dan dengan kerugian ekonomi yang dirasakan mencapai Rp51,4 triliun,” terang Nella Sri Hendriyetty, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) BKF Kementerian Keuangan.

Sejak gempa dan tsunami Aceh pada 2004, pemerintah menyediakan dana cadangan bencana sebesar Rp5-10 triliun tiap tahunnya. Namun, strategi

SKEMA ANGGARAN BENCANA



Tahap Pra Bencana

Alokasi dana kontinjensi bencana untuk kementerian/lembaga yang terlibat penanggulangan bencana seperti BNPB, Kementerian PUPR, Kemensos, dan K/L teknis lainnya.



Tahap Tanggap Darurat

Alokasi dana siap pakai (on call) melalui BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dana ini dimanfaatkan antara lain untuk penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan segera sarana prasarana vital.



Tahap Pascabencana

Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan melalui hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, drainase, sekolah, puskesmas, dan relokasi rumah penduduk merupakan beberapa contoh hasil nyata hibah itu.

pendanaan risiko bencana yang dilakukan pemerintah masih bersifat reaktif di mana pendanaan risiko bencana ditanggung oleh APBN dan APBD. Ketika bencana besar terjadi dan biaya yang diperlukan lebih besar dari alokasi anggaran maka pemerintah harus melakukan relokasi anggaran. Tentu saja ini kemudian berdampak pada tertundanya program prioritas pemerintah yang lain.

Hal senada juga diutarakan oleh Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia. Menurutnya, melihat data kejadian bencana alam 2010-2019 di mana terjadi peningkatan bencana alam secara konsisten dan terukur sehingga perubahan pendekatan penanganan bencana juga perlu menyesuaikan.

“Perubahan pendekatan penanganan bencana dalam hal ini konteks pembiayaan sudah tak terhindarkan lagi memang harus berubah. Tidak hanya reaktif ketika bencana terjadi, tapi lebih proaktif dengan lebih awal memproyeksikan kira-kira bencana apa yang bisa terjadi dan bagaimana kebutuhan pembiayaan apabila bencana itu terjadi,” ujar Yusuf.

Dana bersama bencana

Salah satu instrumen sentral dari strategi proaktif ini adalah Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB). Dana PFB merupakan wujud semangat gotong-royong dalam pembiayaan risiko bencana yang berfungsi ganda yakni menanggung dan memindahkan risiko bencana yang dihadapi pemerintah sebagai sumber pendanaan penanggulangan bencana yang melengkapi APBN.

“Itu adalah sebuah konsep dana bersama dalam rangka penanganan bencana. Ini yang diinvestasikan, disisihkan, setiap tahun kita mengakumulasi sebuah dana sehingga nanti ketika ada bencana diharapkan dana ini bisa digunakan setiap saat,” jelas Made Arya Wijaya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Made menuturkan bahwa kelebihan dari PFB ini adalah dana akan terus terakumulasi jika tidak terjadi bencana. Di lain sisi, PFB menjadi dana siaga yang bisa langsung dipakai kapan saja diperlukan. Dana bersama tersebut diharapkan akan semakin besar setiap tahun seperti halnya dana abadi pendidikan yang setiap tahun dialokasikan.

“PFB menjadi kantong kedua Menteri Keuangan



Dana PFB merupakan wujud semangat gotongroyong dalam pembiayaan risiko bencana

Dok. KPP Palu

sebagai bendahara umum negara. Peran PFB krusial sebagai penguat alokasi dalam APBN atau APBD. Mekanisme pendanaan penanggulangan bencana pun menjadi lebih kuat karena sifatnya melengkapi dan mengakselerasi. Dalam jangka panjang, jika kapasitasnya sudah memadai dan dapat melakukan pendanaan mandiri, PFB diharapkan menjadi sumber utama pendanaan penanggulangan bencana,” tutur Nella menambahkan.

Ada tiga tujuan strategis dari PFB. Pertama, meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk pengurangan risiko bencana. Peningkatan tersebut diharapkan tercipta melalui beberapa skema seperti peningkatan alokasi khususnya di APBD dan di PFB untuk kegiatan pengurangan risiko, semakin luasnya cakupan pengasuransian risiko bencana, besarnya

jumlah dana kelolaan PFB dan peningkatan alokasi atau program untuk pendanaan siap pakai.

Kedua, PFB ditujukan sebagai skema pendanaan untuk mengurangi risiko keuangan negara terhadap bencana. “Hadirnya PFB akan menciptakan penyangga untuk APBN dan APBD dari dana yang dikelola. Akumulasi dana PFB menjadi alat keuangan atau dana cadangan untuk melindungi keuangan negara. Selain itu, pendanaan transfer risiko yang semakin masif akan menjadi sumber pendanaan dari penanggung risiko bagi pemerintah apabila terjadi bencana besar,” jelas Nella.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah adalah penyaluran dana yang tidak tepat waktu dan sasaran. Maka, tujuan ketiga dari PFB yang dikelola oleh BLU adalah mampu mendorong penyaluran dana yang tepat waktu dan sasaran. Manajemen PFB, bersama



Ke depannya PFB juga diharapkan menjadi sumber utama pendanaan penanggulangan bencana

Foto: Resha Aditya

dengan K/L dan Pemda, dapat menciptakan program, standar pelayanan minimal dan standar operasional dan prosedur serta memiliki *key performace index* (KPI) atau indikator kinerja utama (IKU) yang mendorong penyaluran dana yang tepat waktu dan sasaran.

Harapan jangka panjang

Dalam merumuskan PFB sebagai instrumen pendanaan bencana, terbersit harap pengelolaan pendanaan risiko bencana akan lebih kredibel. Selain itu, ke depannya PFB juga diharapkan menjadi sumber utama pendanaan penanggulangan bencana.

“PFB ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bisa mempercayai para ahli di bidang tersebut dapat memberikan sistem mekanisme yang lebih baik. Dengan demikian, dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan, menerapkan prinsip governance yang tepat, dan tentu saja saya mengharapkan keberhasilan PFB dalam mencapai tujuannya,” tutur Nella.

Yusuf juga menyampaikan harapan yang serupa di mana PFB dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan bencana dalam negeri. Menurutnya PFB adalah visi jangka panjang dan agar tidak berhenti hanya dalam aspek mendanai kebutuhan tanggap darurat atau paskabencana, tetapi juga menguatkan aspek prabencana.

“Harapannya PFB tidak hanya berbicara mengenai pemberian dana ke masyarakat atau pemda terdampak, tetapi juga bisa mendukung mitigasi bencana. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana membangun kembali, tapi juga bagaimana misalnya melakukan konsultasi, melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana,” tambah Yusuf.

Tetap adaptif

Di samping perlunya mengatasi tantangan dari segi pendanaan, Made menekankan pentingnya membangun *awareness* atau kesadaran terhadap bencana sedini mungkin. Ia berpendapat akan lebih baik apabila ada edukasi formal di sekolah mengenai pengetahuan tentang bencana.

Selain itu kapasitas dan kompetensi petugas penanganan bencana di lapangan juga perlu ditingkatkan, misalnya dalam memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi bencana. Made pun mengakui ke depan akan semakin banyak tantangan dalam penanganan bencana seiring efek perubahan iklim yang kian terasa. Oleh karena itu, antisipasi kebutuhan anggaran perlu terus disesuaikan.

“Ini kan kita ‘nggak tahu model-model bencananya nanti seperti apa. Tidak bisa lagi kita berpikir paling bencananya cuma banjir, ‘nggak gitu juga kan. Udah model likuifaksi, tanahnya bergeser, pemanasan global. Kan bencana itu, gimana antisipasinya? Ini ya kita harus menyesuaikan juga, termasuk nanti kebutuhan anggarannya,” pungkas Made.



Foto: Resha Aditya



BNPB mencatat 3.461 kejadian bencana alam di Indonesia selama tahun 2022



IDX COMPOSITE
6,196.89
 PERCENT
-0.54%
 CHANGE
-33.45

TRADING VOLUME
15,061 M
 TRADING VALUE
6,933 B
 TRADING FREQUENCY
367,458

RISE
 -0.83%
 Percent
 -5
 Change

RMBA
 348
 0%
 Percent
 0
 Change

RUIS
 3.42%
 Percent
 8
 Change

SAFE
 204
 0%
 Percent
 0
 Change

SATU
 1.8
 Ch

SCBD
 2,700
 0%
 Percent
 0
 Change

367,458
 TRADING FREQUENCY
6,933 B
 TRADING VALUE
15,061 M
 TRADING VOLUME

SATU
 3.42%
 Percent
 8
 Change

percent
 change
 0%
 0
5,100
SCBD

percent
 change
 0%
 0
405
SAFE

percent
 change
 0%
 0
405
SAFE


 Tahun 2022 ditandai dengan beberapa kondisi ekonomi yang menantang akibat gejala geopolitik.

Foto: Shutterstock

LAPORAN UTAMA

Ekonomi Indonesia: Bertahan Dalam Himpitan Global

Oleh: Dara Haspramudilla

Tahun 2022 ditandai dengan beberapa kondisi ekonomi yang menantang akibat gejolak geopolitik yang terus tereskalasi antara Rusia dan Ukraina. Belum lagi persoalan pandemi Covid-19 yang juga masih belum usai, meski sudah cenderung terkendali. Kenaikan harga-harga komoditas pun tak terelakkan, terutama harga energi.

Foto: Irfan Bayu P



Sejak awal tahun 2022, pemerintah optimis kinerja perekonomian tahun 2022 semakin kuat

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Jakarta Global Financial Summit menyampaikan bahwa saat ini risiko pandemi mulai bergeser menjadi risiko gejolak ekonomi global. Ketika pandemi menuju endemi harga-harga akan terjadi peningkatan karena disrupsi sisi *supply*. Ini tidak hanya meningkatkan harga komoditas di domestik, tapi harga komoditas di seluruh dunia. Namun lebih dari itu, adanya tensi geopolitik membuat kenaikan harga-harga komoditas menjadi lebih cepat dan yang dialami adalah bukan hanya harga yang meningkat sangat tinggi, tetapi justru harga-harga yang naik dan turun secara cepat. Misalnya, harga untuk berbagai komoditas seperti gas, batubara, minyak dan juga harga pangan seperti kedelai, jagung, dan lain-lain.

Menurut Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Indonesia harus mewaspadaikan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini sehingga mengakibatkan adanya peningkatan harga pangan dan energi global, serta potensi lonjakan inflasi global yang akan menekan industri pangan dan energi dan sektor keuangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Yose Rizal Damuri, Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS). Faktor peningkatan

permintaan memang tidak dapat dielakkan sebab saat pandemi produksi berbagai komoditas mengalami penyusutan. Di saat pandemi terkendali dan pemulihan ekonomi terjadi permintaan pun berbalik semakin meningkat. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya perang Rusia dan Ukraina.

Dampak gejolak ekonomi global terhadap ekonomi nasional

Arsjad menilai ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina memberikan pengaruh dari sisi ekonomi. Mewakili perspektif kalangan pengusaha menurutnya Pelaku usaha harus benar-benar mencermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi, dunia usaha secara umum dan bisnis perusahaan, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan.

“Kenaikan harga energi dan pangan global, dalam jangka pendek dapat memicu inflasi. Seperti diketahui bersama, Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16 persen dan minyak 11 persen. Sementara itu, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Tak hanya itu, Rusia dan Ukraina merupakan negara yang memproduksi pupuk dan logam yang menjadi bahan baku industri seperti nikel dan paladium,” jelas Arsjad.

Sebagai bagian dari ekonomi dunia, gejolak ekonomi global tentu saja memiliki dampak bagi ekonomi nasional. Namun demikian, Yose berpendapat dampak ini bergantung pada seberapa resilien ekonomi Indonesia.

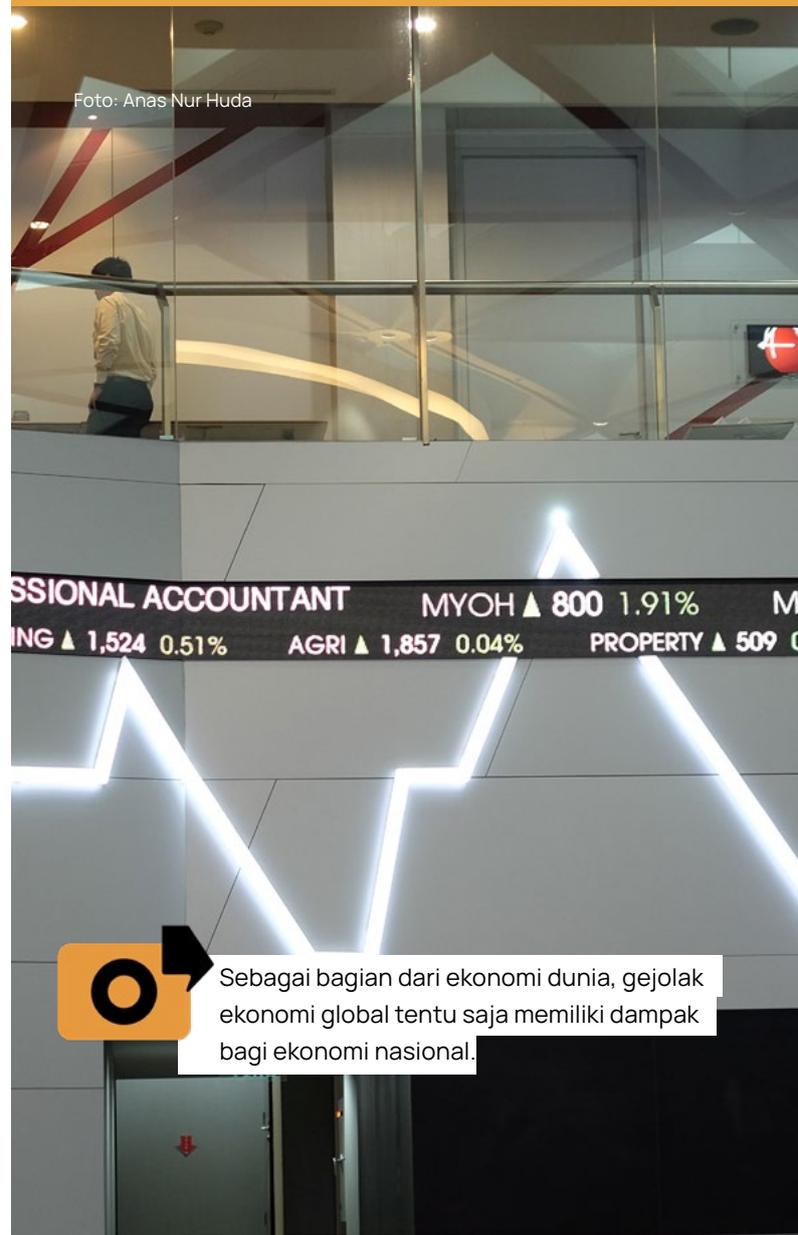
“Sejauh mana Indonesia bisa *stand out* dibandingkan negara-negara yang lain. Apakah kita bisa tetap menjadi primadona atau tidak, itu kan tergantung apakah negara-negara lain lebih baik atau tidak dari kita, atau Indonesia bisa menjadi lebih baik atau tidak. Nah disinilah pentingnya berbagai reformasi yang memang sudah kita lakukan selama masa pandemi ini dan beberapa sudah di dalam *pipeline*,” terang Yose.

Bagaikan dua sisi mata uang, konflik antara Rusia dan Ukraina juga ternyata memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Di sisi lainnya, Indonesia mendapatkan berkah *windfall profit* dari kenaikan harga energi dan komoditas global. Ini tentu saja turut meningkatkan pendapatan negara dari sisi ekspor.

“Namun, di sisi lain sebenarnya, dengan naiknya

harga energi juga mengerek beberapa komoditas utama kita ya. Batubara naik, nikel naik, tembaga naik. Ini efeknya juga positif bagi kita, terutama dari sisi perdagangan kita ya. Neraca berjalan kita yang merupakan ekspor dan impor dari barang dan jasa kita ini menjadi lebih kuat. Ini yang akan memperkuat sisi eksternal kita ya. Dari penerimaan, efek langsung dari kenaikan harga komoditas ini kan juga positif karena penerimaan pajak akan naik, terutama PPH Migas. Untuk nonmigas juga secara tidak langsung akan naik karena *profit* yang akan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan komoditas unggulan kita ya, batubara, CPO, dan lain-lain. Kemudian dari sisi PNBP, itu juga efeknya langsung tadi yang terkait dengan royalti maupun penjualan hasil tambang,” jelas Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Abdurrohman.

Foto: Anas Nur Huda



Sebagai bagian dari ekonomi dunia, gejolak ekonomi global tentu saja memiliki dampak bagi ekonomi nasional.

Indonesia masih baik dan resilien

Tahun 2022 ini memang mengalami fluktuasi yang cepat. Fluktuasi ini menciptakan ketidakpastian sementara Indonesia harus terus mempertahankan momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi. Ini tentu saja menjadi tantangan yang luar biasa. Meski demikian, posisi Indonesia masih cukup baik bahkan jika dibandingkan negara-negara maju jika dilihat dari berbagai indikator ekonomi. Dari segi inflasi, hingga November 2022 inflasi Indonesia berada pada level 5,4 persen. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan Inggris (11,1 persen), Amerika Serikat (7,1 persen), Australia (7,3 persen), Rusia (12 persen) dan negara-negara Eropa (10 persen).

“Perkembangan inflasi Indonesia relatif baik di 5,4 persen. Ini adalah prestasi karena pada saat dunia menghadapi kenaikan harga-harga pangan dan energi, kita masih bisa mengendalikan dengan menjaga *supply* dan distribusi berbagai kebutuhan pangan dan energi nasional,” tutur Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN Kita pada 20 Desember 2022.

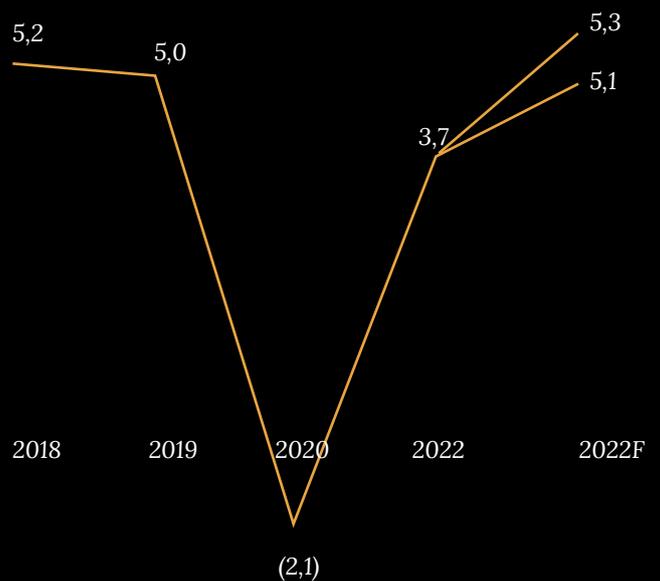
Tidak hanya itu, di tengah situasi ekonomi global yang penuh tekanan serta adanya gejolak geopolitik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 juga relatif masih terjaga. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari beberapa lembaga internasional. Asian Development Bank memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2022 tumbuh 5,4 persen. International Monetary Fund, Bloomberg Consensus dan OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,3 persen. Sementara itu, angka yang sedikit lebih rendah diperkirakan oleh Bank Dunia yakni sebesar 5,2 persen.

KADIN Indonesia pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam melewati krisis baik akibat pandemi maupun tekanan geopolitik sehingga dapat menghasilkan indikator ekonomi yang masih baik.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang melonggarkan APBN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam upaya meningkatkan *supply side* dan *demand side*. Karena kebijakan tersebut berhasil mengkoordinasikan sumber daya kesehatan dan bantuan sosial dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat di seluruh negeri dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, Indonesia

PERTUMBUHAN EKONOMI DIPERKIRAKAN MENINGKAT SIGNIFIKAN

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (% , YOY)



PROYEKSI PERTUMBUHAN INDONESIA OLEH LEMBAGA INTERNASIONAL

Lembaga	2022	2023
IMF (WEO Okt)	5,3	5,0
Bank Dunia (IEP Dec)	5,2	4,8
ADB (ADO Update Sept)	5,4	5,0
Bloomberg Concensus (Des)	5,3	4,9
OECD (Nov)	5,3	4,7



Bagaikan dua sisi mata uang, konflik antara Rusia dan Ukraina selain dampak negatif juga memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia

Foto: Shutterstock

mampu melewati krisis lebih baik jika dibandingkan dengan ekonomi negara lainnya di dunia,” ujar Arsjad.

Melakukan reformasi struktural

Dalam mengatasi tantangan akibat dinamika global, Arsjad berpendapat pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan berinovasi untuk meredam dampaknya terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, selama ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56 persen dari total PDB Indonesia. Secara bertahap harus dialihkan pada sektor yang lebih produktif dan dapat mendorong investasi dan ekspor. Investasi yang masuk diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh efektifitas kebijakan pemerintah dalam memulihkan daya beli masyarakat serta daya tarik investasi langsung yang berdampak pada peningkatan

lapangan kerja. Implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi, penciptaan iklim usaha yang lebih baik dalam meningkatkan daya saing Indonesia,” tambah Arsjad.

Menurut Wakil Menteri Keuangan dalam Indonesia Economic Outlook 2023: Overcoming Economic Challenge Through Sustainability, pemerintah terus berkomitmen dalam melakukan upaya-upaya reformasi struktural. Dua di antaranya adalah Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU Cipta Kerja yang dikeluarkan pada tahun 2020 diharapkan dapat mengubah lanskap ekonomi Indonesia. Dalam UU ini seluruh sektor disentuh mulai dari infrastruktur, kesehatan, perpajakan, transformasi perizinan, bahkan kebijakan pusat dan daerah. UU Cipta Kerja menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, memangkas birokrasi, dan meningkatkan produktivitas. Sementara

ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES & PROFESSIONAL ACCOUNTANT

Investor33 ▼ 392 -0.45% ISSI ▼ 181 -0.23% MINING ▲ 1,524 0.51% AGRI ▲ 1,0...



Dalam mempertahankan keberlanjutan pemulihan ekonomi, pemerintah juga terus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Foto: Shutterstock

itu, UU HPP juga tidak kalah pentingnya. Undang-undang ini menjadi tonggak penting terutama dalam mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan kualitas transfer fiskal ke pemerintah daerah.

Menggali potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru

Dalam mempertahankan keberlanjutan pemulihan ekonomi, pemerintah juga terus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam pembukaan 11th AIFED Post Pandemic Policy, Wakil Menteri

Keuangan menyampaikan bahwa terdapat tiga potensi sumber pertumbuhan ekonomi yang sudah diidentifikasi. Pertama, digitalisasi sebab dalam dua tahun terakhir khususnya di masa pandemi ekonomi digital menjadi salah satu fundamental yang menjadi sumber pertumbuhan baru. Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dalam dua atau tiga tahun terakhir melalui digitalisasi.

Sumber pertumbuhan baru yang kedua adalah ekonomi hijau. Komitmen pemerintah dalam melakukan



transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya tercermin dari membangun energi baru dan terbarukan, tetapi juga dari upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil seperti memensiundinikan pembangkit listrik tenaga batubara.

Selain itu, upaya Indonesia dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals juga membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru ke depan. Pandemi mengajarkan kita untuk melihat adanya hubungan erat antara ekonomi dan

kesehatan dan itu membuka ruang-ruang ekonomi di masa depan.

“Pengalaman kita selama dua tahun terakhir, ekonomi dan kesehatan menjadi sangat penting dan sangat memberikan perspektif baru bagaimana mengelola ekonomi, makro, fiskal, moneter, kebijakan di sektor ketenagakerjaan, dan berbagai macam kebijakan di sektor lainnya untuk Indonesia lebih baik ke depan,” pungkas Wakil Menteri Keuangan.



Sangat krusial untuk menyiapkan bantalan kebijakan (policy buffer) untuk menghadapi situasi sulit (masa resesi).

Foto: Anas Nur Huda

LAPORAN UTAMA

APBN 2023: Optimis dan Waspada

Oleh: CS. Purwowidhu

“Suatu keniscayaan jika suatu perekonomian akan menghadapi siklus ekonomi (*business cycle*), episode makmur (*boom*) dan episode paceklik (*resesi*). Oleh karena itu, sangat krusial untuk menyiapkan bantalan kebijakan (*policy buffer*) untuk menghadapi situasi sulit (masa *resesi*)”-Sri Mulyani Indrawati-



APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejala global yang masih terus berlangsung.



PUSK KECAMATAN JAKARTA

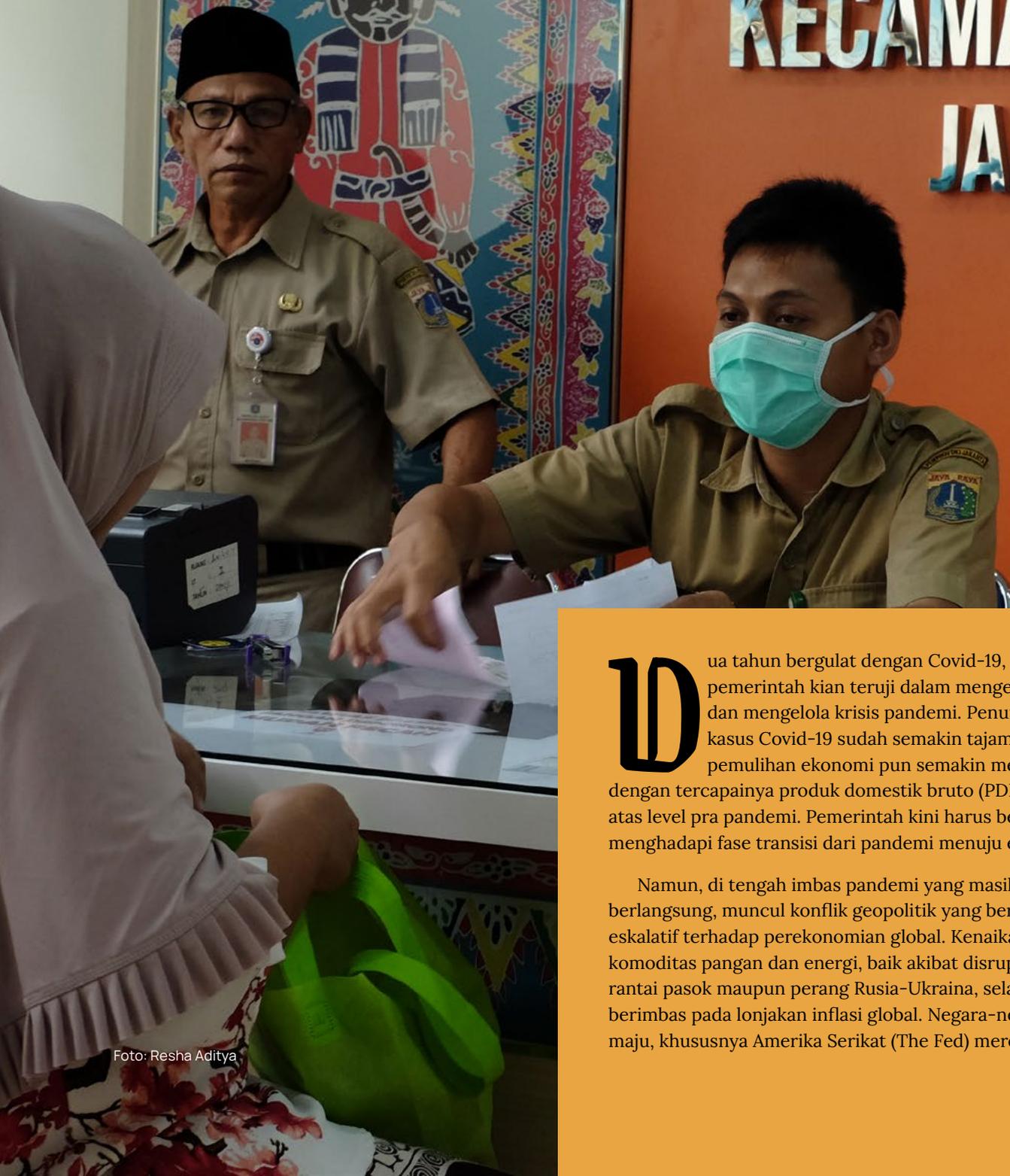


Foto: Resha Aditya

Dua tahun bergulat dengan Covid-19, pemerintah kian teruji dalam mengendalikan dan mengelola krisis pandemi. Penurunan kasus Covid-19 sudah semakin tajam, pemulihan ekonomi pun semakin menguat dengan tercapainya produk domestik bruto (PDB) di atas level pra pandemi. Pemerintah kini harus bersiap menghadapi fase transisi dari pandemi menuju endemi.

Namun, di tengah imbas pandemi yang masih berlangsung, muncul konflik geopolitik yang berdampak eskalatif terhadap perekonomian global. Kenaikan harga komoditas pangan dan energi, baik akibat disrupsi rantai pasok maupun perang Rusia-Ukraina, selanjutnya berimbas pada lonjakan inflasi global. Negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat (The Fed) merespons

kondisi tersebut dengan mempercepat pengetatan kebijakan moneter serta menaikkan suku bunga, yang semakin mengguncang situasi dunia.

Semua risiko tersebut mendatangkan ancaman baru bagi pemulihan ekonomi global dan domestik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 oleh Dana Moneter Internasional (IMF) lantas terkoreksi ke level 2,7 persen, terlemah sejak 2001, kecuali masa pandemi Covid-19 dan krisis keuangan global.

Kebijakan fiskal antisipatif dalam merespons gejala tersebut. Pemerintah memakai APBN sebagai bantalan atau *shock absorber* atas guncangan yang terjadi. Pada 2022 lalu, subsidi dan kompensasi energi ditambah. Meskipun akhirnya kenaikan harga BBM tak terhindarkan akibat tren peningkatan harga minyak mentah dan ICP, serta kuota BBM bersubsidi semakin menipis. Namun, pengalihan subsidi ke bantuan sosial ditempuh, di samping penambahan anggaran perlindungan sosial yang juga telah dilakukan.

Dengan demikian, kenaikan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terlindungi. Sehingga momentum pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap bisa terjaga. Kebijakan fiskal yang antisipatif ini akan dilanjutkan pada tahun 2023.

“KEM-PPKF Tahun 2023 memberikan dukungan memperkuat peran kritikal APBN agar tetap responsif dan fleksibel sebagai *shock absorber* untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 (31/05/22).

Optimis namun waspada

APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejala global yang masih terus berlangsung.

Optimis karena perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5 persen. Inflasi juga relatif moderat dibandingkan negara-negara lain tercatat di level 5,71 persen (yoy) pada Oktober 2022. Di sisi lain, neraca perdagangan bertahan surplus dalam 30 bulan

berturut-turut serta indeks PMI relatif ekspansif selama 14 bulan terakhir, walaupun tetap perlu dicermati karena dalam satu bulan terakhir mengalami penurunan

Kendati demikian, pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan *zero covid policy* di RRT yang menyebabkan perlambatan ekonominya, maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan mengakibatkan perlemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.

Di tengah dinamika global yang masih terus terjadi, pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia pada 2023 mampu tumbuh 5,3 persen.

“Jadi APBN (2023) temanya tetap sama, optimis namun waspada. Menyediakan bantalan-bantalan bagi masyarakat dan ekonomi yang kemungkinan terancam oleh berbagai guncangan, baik itu inflasi maupun pelemahan ekonomi global. Namun di sisi lain, APBN-nya sendiri tetap dijaga hati-hati agar menjadi instrumen yang tetap sehat dan kredibel,” lugas Sri Mulyani.



Peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Foto: Storypost/I Putu Adi PU

RINCIAN UU APBN 2023:

PENDAPATAN NEGARA

Rp2.463 T

Penerimaan Pajak: Rp1.718 T

Kepabeanan dan Cukai: Rp303,2 T

Penerimaan Negara Bukan Pajak: Rp441,4 T

BELANJA NEGARA

Rp3.061,2 T

Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.246,5 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Rp814,7 T

FOKUS BELANJA APBN 2023

Pendidikan Rp612,2 triliun

Perlinsos Rp476 triliun

Infrastruktur Rp392,1 triliun

Ketahanan energi Rp341,3 triliun

Pertahanan dan keamanan Rp316,9 triliun

Kesehatan Rp178,7 triliun

Ketahanan pangan Rp104,2 triliun

Perkuat kesehatan APBN

Di samping mengakomodir upaya persiapan masa transisi pandemi ke endemi, sertaantisipasi terhadap ketidakpastian dinamika global yang tinggi, pemerintah juga menyiapkan APBN 2023 sebagai *baseline* baru kebijakan makro ekonomi dan fiskal pascaimplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU 2/2020). Sesuai amanat UU 2/2020, pada tahun 2023 defisit APBN harus kembali ke level di bawah 3 persen dari PDB. Adapun defisit APBN 2023 dirancang sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen PDB.

Sri Mulyani menyatakan pada saat ekonomi nasional semakin menguat dan pulih dari krisis akibat pandemi, pilihan kebijakan konsolidasi fiskal tetap harus dilakukan. Di satu sisi, hal tersebut untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor swasta untuk semakin pulih. Di sisi lain, kebijakan konsolidasi fiskal juga akan memastikan kesehatan dan sustainabilitas APBN untuk dapat kembali menyerap tekanan jika terjadi guncangan kembali di kemudian hari.

Senada, Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky berpendapat konsolidasi fiskal perlu dilakukan dan momentum ini merupakan langkah yang tepat sebelum lebih jauh memasuki tahun politik. Selama kebutuhan untuk mensejahterakan serta melindungi masyarakat masih bisa dipenuhi dengan kapasitas fiskal yang tersedia maka konsolidasi tersebut menurut dia baik adanya.

Adapun untuk kembali ke level defisit di bawah 3 persen tersebut, menurut Riefky pemerintah perlu memperhatikan alokasi-alokasi belanja dan mengoptimalkan penerimaan. Namun tetap menjaga agar pemulihan ekonomi yang sedang berjalan tidak melambat.

“Jadi saya rasa problemnya saat ini yang dihadapi adalah bagaimana kita memiliki *timing* yang tepat dari sisi kebijakan agar proses pemulihan ekonomi ini bisa terjadi secara *smooth*. *Smooth landing* ini memang perlu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah,” tutur Riefky.

Fokus APBN 2023

Kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.



Peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Foto: Irfan Bayu P

Peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*, serta visi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai.

Karena itu, APBN 2023 berfokus kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.

Ketiga melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima,

revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Keenam fokus tersebut akan diimplementasikan melalui belanja negara dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp814,7 triliun.

Sementara itu, untuk menjalankan berbagai program belanja, maka pemerintah menargetkan penerimaan negara tahun 2023 sebesar Rp2.463,0 triliun. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui beragam bentuk implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan.



APBN adalah uang rakyat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Foto: Irfan Bayu P

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan target penerimaan tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, serta kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Sementara, Ekonom INDEF Abra Talattov memandang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,3 persen pada 2023 diharapkan akan mampu mendorong penerimaan perpajakan. Untuk itu, diperlukan bukan hanya stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan politik.

“Penerimaan perpajakan juga seharusnya masih *on the right track*, penerimaan PPh, PPN, dan sumber-

sumber perpajakan lain itu kita harapkan masih akan positif selama lagi-lagi pemerintah mampu melakukan upaya stabilisasi inflasi,” ungkap Abra.

Sementara itu, Riefky mengemukakan pentingnya pengelolaan penerimaan dan belanja negara secara proporsional. Riefky memandang konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus bertumbuh positif merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Penyerahan DIPA lebih dini

APBN adalah uang rakyat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, semakin cepat pemerintah mengeksekusi rencana kerja maka semakin cepat manfaat APBN dirasakan

harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun.

Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara yang baik di pusat maupun daerah. Peningkatan sinergi belanja antara pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan mendorong sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.

“Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang,” ujar Made.

Made menuturkan Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan. Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.

“Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera (dieksekusi), sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Made. Dengan demikian, diharapkan sudah tidak ada lagi komplain bahwa anggaran turun lambat. Semestinya mulai 2 Januari (2023) ketika DIPA sudah efektif, pelaksanaan kegiatan di satuan kerja sudah bisa dilakukan.



Foto: irfan Bayu P



Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara yang baik di pusat maupun daerah.

G20
INDONESIA
2022



Indonesia memulai perhelatan G20 dengan harapan menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif.

LAPORAN UTAMA

Perhelatan G20 dan Beragam Manfaat Bagi Dunia

Oleh: Reni Saptati D.I.

Indonesia memulai perhelatan G20 dengan harapan menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif. Di sepanjang perjalanan, berbagai tantangan baru muncul dan mengancam kehadiran krisis yang lebih dalam. Namun, sebagai Presidensi G20, Indonesia mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan.

Foto: Ock/Bro/OLI



Indonesia mendapat kepercayaan untuk memegang presidensi atau menjadi tuan rumah Forum G20 pada tahun 2022.

Indonesia mendapat kepercayaan untuk memegang presidensi atau menjadi tuan rumah Forum G20 pada tahun 2022. Salah satu pertemuan yang penting dalam rangkaian kegiatan G20 adalah pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG). Pertemuan pertama digelar pada 17 dan 18 Februari 2022 di Jakarta dan pertemuan kedua dilaksanakan pada 20 April 2022 di IMF Headquarter, Washington DC.

Pertemuan ini digelar di tengah kondisi yang menantang saat sedang terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Meski terdapat dinamika dalam penyelenggaraan pertemuan kedua FMCBG, pertemuan level dunia tersebut tetap dapat berjalan dengan baik.

Para negara anggota berpendapat bahwa G20 memiliki peran yang signifikan dalam menangani permasalahan dan tantangan ekonomi global yang kompleks dan multi-dimensional.

Pada 15-16 Juli 2022, Indonesia menyelenggarakan pertemuan ketiga G20 FMCBG di Bali. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut hadir 16 Menteri Keuangan, 10 Gubernur Bank Sentral, dan 6 organisasi internasional. Mereka menyepakati G20 harus memberikan sinyal yang jelas dan aksi nyata dari keberadaan forum G20 untuk mengatasi tantangan global.

“Jadi, krisis akibat pandemi harus diatasi. Juga

Foto: Dok. Biro KL



Sejak awal tahun 2022, pemerintah optimis kinerja perekonomian tahun 2022 semakin kuat

bagaimana respons global terhadap perang di Ukraina serta tiga krisis baru, yakni krisis pangan, energi, dan keuangan. Semua hal tersebut dibahas,” lanjut Wempi.

Memperkuat ketahanan pangan dan energi domestik

Suasana FMCBG ketiga ini terasa berbeda dengan pertemuan pertama pada 17-18 Februari 2022 di Jakarta dan pertemuan kedua pada 20 April 2022 di Washington DC karena situasi ekonomi global yang semakin rumit.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia mendorong pertemuan bersama antara Menteri Keuangan dan Pertanian negara-negara G20 untuk meningkatkan koordinasi dan mengeksplorasi

sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nella Sri Hendriyetti menyatakan pertemuan tersebut mencari alternatif solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan pasar, dukungan untuk perdagangan hasil pertanian, serta proposal tentang bagaimana kolaborasi global dapat diperkuat untuk mengatasi masalah kerawanan pangan.

“G20 mengajak berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk IMF, untuk memperkuat komitmen melalui program-program yang spesifik guna mencegah krisis global yang dipicu oleh harga pangan yang tinggi, serta memastikan tersedianya cukup pasokan makanan bagi yang membutuhkan, memungkinkan semua orang yang rentan untuk mengakses makanan yang mereka butuhkan, dan memungkinkan semua orang untuk mengakses bantuan pangan kemanusiaan,” lanjut Nella.

“Di dalam rangkaian FMCBG ketiga, Kementerian Keuangan memanfaatkan momentum dengan meluncurkan sebuah *country platform* untuk mekanisme transmisi energi, yaitu *Energy Transition Mechanism*,” sebut Nella.

ETM merupakan rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transmisi energi bersih menuju *net zero emission* dengan cara yang adil dan terjangkau.

Sumber harapan bagi masyarakat dunia

Pertemuan Keempat FMCBG berlangsung pada 12-13 Oktober 2022 di Washington D.C. Di depan seluruh negara anggota, negara undangan, serta organisasi internasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi sejumlah tantangan ekonomi global yang tengah dihadapi.

“Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia dalam keadaan bahaya. Kita sekarang menghadapi risiko yang terus meningkat dan bertambah. Inflasi yang

ENAM AGENDA PEMBAHASAN FMCBG G20:

- 1) *Ekonomi Global*
- 2) *Arsitektur Keuangan Internasional*
- 3) *Peraturan Sektor Keuangan*
- 4) *Investasi Infrastruktur*
- 5) *Keuangan Berkelanjutan*
- 6) *Perpajakan Berkelanjutan.*

tinggi, pertumbuhan yang lemah, kerawanan energi dan pangan, risiko iklim, dan fragmentasi geopolitik,” ucap Menteri Keuangan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016 tersebut.

Sri Mulyani Indrawati menilai tujuan presidensi G20 tahun ini yakni *Recover Together Recover Stronger*, kini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Kepemimpinan yang kuat dan tindakan kolektif yang cepat diperlukan untuk melindungi penghidupan masyarakat dunia yang kian rentan sekaligus membawa dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

“Saya sangat percaya G20 merupakan sumber harapan untuk membantu dunia menavigasi gelombang krisis yang memporak-porandakan situasi global yang tengah kita hadapi. Kepercayaan ini lahir dari kesuksesan G20 dalam merespons krisis keuangan global 2008, hingga yang terkini dalam aksi penanganan pandemi COVID-19,” tegas Sri Mulyani Indrawati.

Dalam acara seminar *Indonesia’s Strategic Role In The G20: Expert Perspective* yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2022, ekonom senior CORE Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan pendapat serupa. Ia menilai yang diperlukan oleh semua negara, termasuk Indonesia, pada situasi seperti sekarang ini adalah harapan. Ia berpandangan G20 dapat menciptakan harapan bagi seluruh masyarakat agar mereka bisa pulih.

Hendri Saparini juga mengungkapkan keberadaan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini merupakan peristiwa penting dan bersejarah. Apalagi, kepemimpinan Indonesia berlangsung saat dunia sedang menghadapi krisis yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut Hendri, pemulihan yang terjadi kali ini menjadi tidak mudah karena pilihan-pilihan kebijakannya pun sulit. Selain itu, negara-negara anggota G20 terdiri atas negara-negara dengan kondisi yang sangat berbeda. Ada negara adidaya dan ada negara-negara berkembang. Akibatnya, cukup sulit untuk membuat kesepakatan dalam langkah bersama keluar dari krisis.



Pada pertemuan keempat, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 membahas enam agenda utama yang merupakan seluruh komitmen yang telah dibuat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Fokus hasilkan aksi nyata

Pada pertemuan keempat, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 membahas enam agenda utama yang merupakan seluruh komitmen yang telah dibuat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Keenam agenda itu yaitu koordinasi dan penyelarasan tindakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan dunia, memastikan ketahanan jangka panjang dari arsitektur ekonomi internasional, kemajuan regulasi dan pengawasan sektor finansial, meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan dari keuangan yang berkelanjutan, memperbaiki investasi infrastruktur, dan implementasi paket pajak internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia telah bersungguh-sungguh untuk mengupayakan diskusi G20 berjalan lancar dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan kuat dari semua anggota.

“Kita harus terus melangkah ke depan. Kita perlu menghasilkan aksi konkret dengan menunjukkan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus. Secara historis, G20 telah mencatatkan kemampuan kita untuk melalui ini semua,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Dalam forum pertemuan tersebut, anggota G20 menegaskan kembali komitmen mereka terhadap

Foto: BPMI Setpres

kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan mengurangi efek luka pandemi atau *scarring effect*. G20 diharapkan tetap dapat menghasilkan prakarsa nyata yang dapat membantu dunia mengatasi berbagai tantangan.

Selaku Presidensi G20, Indonesia juga berinisiatif menyelenggarakan Pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers (JFAMM) yang pertama di Washington D.C. pada tanggal 11 Oktober 2022 lalu. Dalam perhelatan ini, para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 berkumpul membahas permasalahan kerawanan pangan global.

G20 JFAMM menjadi pertemuan pertama dari para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara G20 untuk merespon ancaman kerawanan pangan global. Permasalahan kerawanan pangan telah menjadi perhatian

INDONESIA



G20 INDONESIA
2022



Pada 15 November 2022, Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski Bali.

forum G20, sebagaimana isu tersebut telah diangkat dalam High-Level Seminar: Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity serta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ketiga pada Juli 2022 lalu. Para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 menyadari bahwa hulu dari permasalahan kerawanan pangan bertumpu pada sektor pertanian.

Dalam konferensi pers G20 JFAMM pada tanggal 11 oktober 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, “Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang kerawanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain.”

Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan kerawanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative. G20 siap mendukung dan bekerja sama dengan beberapa gerakan inisiatif kerawanan pangan tersebut.

Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait kerawanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. FAO pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 AMIS.

G20 berkomitmen untuk mempertimbangkan segala hal yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara. Inisiatif dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan global yang dihasilkan dari Presidensi G20 Indonesia akan terus dijalankan dan dikawal hingga Presidensi selanjutnya pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan India.

Pengesahan G20 Bali Leaders Declaration

Pada 15 November 2022, Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski Bali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan negara G20 dan tamu undangan di KTT G20 tersebut. Keesokan harinya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan KTT G20 di Bali telah berhasil mengesahkan Deklarasi Pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders Declaration.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022,” kata Presiden pada pidato penutupan KTT G20 yang diselenggarakan di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11).

Deklarasi ini memuat 52 poin yang mencakup persoalan ketegangan geopolitik global, perubahan iklim, kesehatan global, krisis pangan, transformasi digital, kecaman sebagian besar anggota terhadap invasi Rusia ke Ukraina, mendorong jalur diplomasi dalam penyelesaian konflik dan tidak menerima ancaman penggunaan senjata nuklir.

Presiden juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan *concrete deliverables* yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerja sama tersebut yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.

“Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. *Let us recover together, recover stronger,*” pungkas Presiden.

POTRET KANTOR

Damai di Sumba

Oleh: Aditya Wirananda

Damai. Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna kata ini adalah rukun, tidak bermusuhan. Dan, bila kita bicara tentang damai, maka kita sedang bicara tentang realitas yang terjadi di Waingapu, kota kecil di pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kabupaten Sumba Timur.



 Front office pada KPPN Waingapu

Foto: Irfan Bayu

Kerukunan umat

Mengacu pada rilis BPS tahun 2020, Waingapu dihuni oleh 50 persen umat kristiani, 31 persen muslim, 14 persen katolik, serta 5 persen penduduk yang menganut agama dan kepercayaan lain. Keberagaman macam ini tidak lantas membuat banyak sekat di masyarakat. Nyatanya, keragaman ini justru jadi perekat antarumat di Waingapu. Kepala KPPN Waingapu, Nur Aida, mengamini hal tersebut. Srikandi kelahiran Waingapu itu mengatakan kerukunan seperti itu telah terjadi turun temurun sejak era leluhurnya.

Saking damainya, komunitas keagamaan di kota yang masyhur dengan kuda Sandel ini bahkan rutin menggelar berbagai kompetisi antarumat beragama. Ada banyak hal yang dipertandingkan. Sepakbola, voli, sampai futsal antarumat beragama. Indah, bukan? Soal kerukunan antarumat, kita perlu banyak belajar pada Waingapu.

Rentan bencana

Seolah menjaga keseimbangan, kondisi sosial yang harmonis sayangnya mesti diiringi kondisi geografis yang berkebalikan. Letaknya yang berada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia mengakibatkan Waingapu lebih rentan bencana.

Pada 2018, menurut catatan BPS Nusa Tenggara Timur, kabupaten Sumba Timur dihantam 233 bencana alam. Tiga yang paling kerap terjadi adalah banjir, angin kencang, dan gempa bumi. Sedangkan pada 2021 silam, setidaknya ada dua bencana besar yang bikin kerusakan signifikan di Sumba Timur, khususnya Waingapu. Pertama, badai Seroja yang tidak hanya menghantam Waingapu tetapi juga sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kedua, banjir bandang yang terjadi pada kuartal kedua tahun lalu.

Komitmen pelayanan

Kendati demikian, takdir geografis ini tak bikin para pegawai Kementerian Keuangan di Waingapu jadi surut semangat melayani masyarakat. Bahkan, saat badai Seroja menerpa, KPPN Waingapu tetap buka. “Tetap buka. KPPN terus melayani,” ujar Nur Aida. Sejumlah pegawai bahkan rela menginap di kantor.

Selain tetap melayani sebagai bendahara umum negara di wilayah itu, KPPN Waingapu juga hadir sebagai saudara. Para pegawai bersama-sama menyalurkan

terdampak bencana saat itu. “Sekali lagi, (pegawai) Kementerian Keuangan itu sudah terpatri komitmen pelayanan itu,” ujar mantan Kepala KPPN Larantuka ini.

Komitmen pelayanan ini tak hanya sekali waktu meletup. Sehari-hari, para pegawai rutin membangun komunikasi dengan para satuan kerja demi realisasi APBN yang lebih optimal. Nur Aida juga mengatakan bahwa ia dan timnya punya kegiatan yang dinamai pawandang. “Pawandang itu (bagi masyarakat Sumba) seperti undangan untuk melakukan kerja sama, gotong royong untuk hasil yang lebih baik,” ujar Nur Aida.

Melalui pawandang, ia lebih bisa menjalin komunikasi dan pendekatan kepada pimpinan satuan kerja untuk mengoptimalkan realisasi APBN di masing-masing unitnya. Ia mengundang masing-masing pimpinan unit itu secara rutin beberapa minggu sekali. Selain untuk memberikan masukan terkait strategi pengelolaan anggaran, ia juga melakukan pertemuan itu untuk memantau kinerja anggaran secara periodik. “Dan, saya tidak melakukan itu secara resmi. Kita duduk saja, sambil ngobrol, sambil ngopi. Biar nyaman,” ujarnya. “Saya berharap dengan pendekatan seperti itu ada dampak yang signifikan. Ya, bagaimana kita memastikan dana ini sampai ke masyarakat gitu,” pungkasnya.

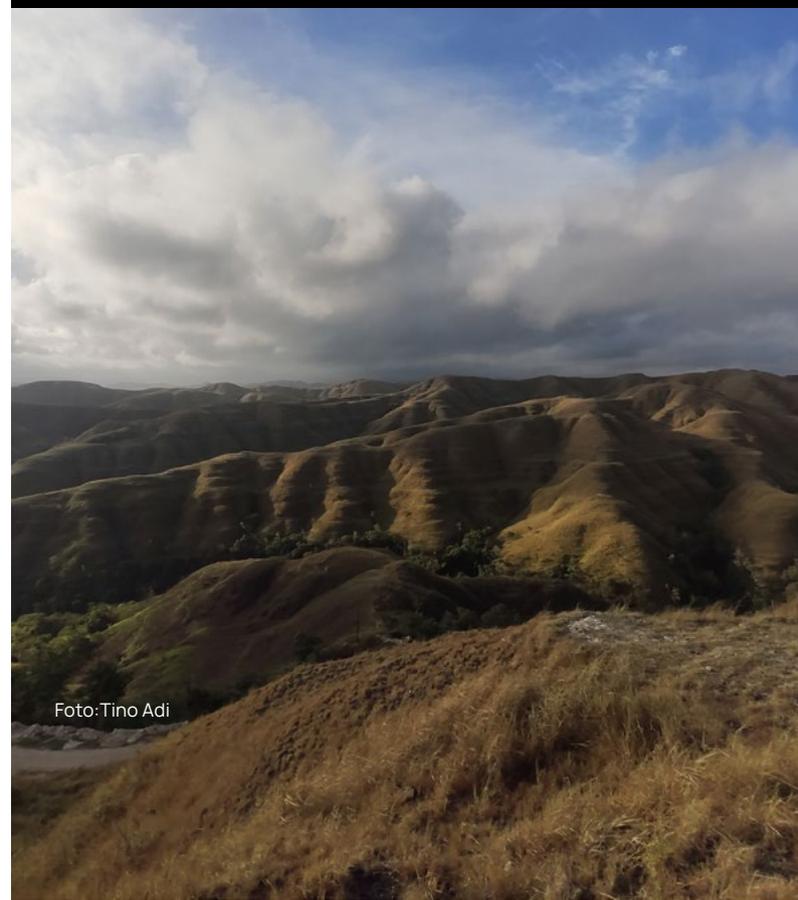


Foto: Tino Adi

GENERASI EMAS

Umar Syaroni Tunadaksa Master Komunikasi

Oleh: Irfan Bayu P



Umar Syaroni, Awardee Beasiswa Afirmasi
Penyandang Disabilitas LPDP

Foto: Dok. Pribadi

Penyandang disabilitas memang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang. Namun, mungkin anda harus berfikir ribuan kali untuk melakukannya pada pria satu ini. Namanya Umar Syahroni, penyandang tunadaksa di bagian kedua tangannya yang merupakan Awardee Beasiswa Afirmasi Penyandang Disabilitas LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan telah berhasil menyelesaikan pendidikan masternya di Universitas Airlangga, Surabaya.

Bullying di negeri asing

Umar, panggilan akrabnya, sejak lahir memang memiliki kondisi yang istimewa, dia lahir dengan kelainan pada kedua tangannya. Kedua tangannya dari lengan hingga jarinya memiliki ukuran yang kecil tak seperti orang pada umumnya. Tak ada jari yang

lengkap, namun dia masih bisa menggunakannya untuk memegang sesuatu dan bahkan untuk menulis, ya menulis. Bukan hal mudah bagi kedua orang tuanya menerima keadaan tersebut. Banyak cibiran yang datang silih berganti masuk ke telinga orang tuanya. Bahkan saat Umar masih bayi ada yang menyarankan orang tuanya untuk menenggelamkan Umar, tetapi mama dan baba, panggilan Umar pada orang tuanya, memilih untuk tetap membesarkannya dengan rasa sayang dan ketulusan hati yang tak bisa dinilai lagi.

Kedua orang tuanya yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jeddah, Arab Saudi, mengharuskan Umar menghabiskan seluruh waktunya di tanah Arab. Barulah saat dia berumur 19 tahun, Umar kembali menginjakkan kakinya di Indonesia dengan tujuan utamanya untuk melanjutkan studi. Umar kecil sedari SD hingga SMA bersekolah di Sekolah Indonesia-Jeddah yang menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan di bawah naungan Konsulat Jendral RI di Jeddah. “Tidak banyak yang berbeda dengan sekolah di Indonesia, (perbedaanya) untuk muatan lokal kami tidak mendapat bahasa daerah namun Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Bekal bahasa (itu) yang saya syukuri”, jelas pria kelahiran Jeddah ini.

Hidup di negeri orang memang tidak mudah, apalagi dengan kondisinya yang berbeda dengan orang lain. *Bully* menjadi dinding tebal yang selalu menghimpitnya. “Sejak kecil saya mengalami *bully* baik oleh teman-teman maupun orang tak dikenal,” terangnya. Orang lain kerap memandang rendah Umar, dia sering dihina, diremehkan dan dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Beruntungnya, Umar dikaruniai orang tua yang sabar dan selalu menyayangnya. Ketika dia ditolak sekolah, ibunya dengan sabar mengajarnya untuk menulis hingga Umar bisa menggunakan tangan mungilnya untuk menulis sendiri layaknya anak lain seusianya. “Sejujurnya saya akan biasa saja menghadapi *bully* sendirian, (namun) saya akan sangat sedih jika orang tua saya sampai menangis ketika melihat saya di-*bully*,” jelas Umar yang saat ini tinggal di Surabaya. Kepercayaan dan kerja keras orang tuanya tersebut dibayar tuntas oleh Umar dengan gelar magisternya di bidang media dan komunikasi yang baru dia selesaikan pertengahan tahun kemarin.

Tari penawar rindu pada negeri

Hidup jauh dari kampung halaman membuat

Foto: Dok. Pribadi



Seni tari menjadi pilihan untuk mengekspresikan sekaligus obat rindu bagi Umar yang hidup di Jeddah.



Umar berhasil menjadi lulusan tercepat untuk program Magister Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga.

Foto: Dok. Pribadi

Umar mencari sesuatu yang bisa mendekatkannya dengan Indonesia. Seni tari menjadi pilihan untuk mengekspresikan sekaligus obat rindu bagi Umar yang hidup di Jeddah. Ketertarikannya sudah ada sejak kecil, dia selalu bersemangat ketika melihat pentas tari di sekolah ataupun di kantor konsulat. Sajian budaya yang dilihatnya tak jarang membuat dia takjub. Akhirnya pada tahun 2010 bersama temannya, dia memulai kegiatan menari “Sejak kelas 2 SMP, saya dan sahabat, Abdullah, membuat sanggar di sekolah. Kami melatih beberapa adik kelas. Mereka tampil di pentas sekolah maupun pentas kebudayaan di Konjen RI Jeddah. Kami juga sering membuat tari kreasi,” jelas Umar yang tahun ini akan berumur 26 Tahun. Puncaknya ketika perpisahan angkatan, Umar bersama teman-temannya menampilkan Sendratari Sangkuriang dengan total 27

penari. Hingga saat ini Umar masih aktif dalam kegiatan menari seperti halnya saat dia berkuliah di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, sejak 2015 dia bergabung dalam UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Seni Tari, dan pada tahun 2017 dia dipercaya sebagai koreografer tari tradisional. Umar mendampingi anggota UKM Tari yang akan tampil dalam kegiatan di dalam dan luar kampus. Jiwa tari sepertinya mengalir deras dalam tubuh Umar, yang bahkan mempenaruhi mimpinya, “saya berharap, suatu saat jika saya berkesempatan kuliah S3 di luar negeri, saya ingin menampilkan tari tradisional untuk mengenalkan Indonesia pada dunia,” ungkap Umar.

Tak bisa berpaling dari komunikasi

Umar memang suka berbicara di depan umum, bukan sembarang bicara, saat di bangku sekolah dia

sering menjuarai berbagai kompetisi pidato 3 bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab). Berangkat dari hal tersebut, Umar menyadari bahwa dia mempunyai *passion* di bidang ilmu komunikasi. Tujuan utamanya kembali ke Indonesia memang untuk berkuliah, pada 2015 dia membulatkan tekad untuk berkuliah di Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya. Dia mengambil jurusan Ilmu Komunikasi yang didambkannya. “Ilmu Komunikasi punya cakupan yang luas, cocok dengan saya yang suka belajar banyak hal,” terangnya. Tak tanggung-tanggung, Umar berhasil menyelesaikan studinya dengan gelar sebagai lulusan terbaik.

Setelah lulus sarjana, Umar mengabdikan diri menjadi praktisi humas dan protokoler di almamaternya itu. Setelah bekerja, Umar menyadari bahwa masih banyak kompetensi lain yang harus dia pelajari. Namun, biaya kembali menjadi penghalang, hidup di keluarga yang sederhana membuat skala prioritas untuk melanjutkan studi mungkin berada di nomor sekian, bahkan Umar sempat ingin mengubur mimpi untuk pendidikan S2-nya. Tak patah arang, Umar mencoba mencari beasiswa yang bisa menjembatannya menggapai mimpi. Umar akhirnya menemukan LPDP, melalui beasiswa afirmasi yang menasar penyandang disabilitas, dia menemukan *runway* yang akan membawanya terbang. “Kehadiran skema beasiswa ini membawa asa dan menjadi jawaban atas inklusivitas yang diharapkan penyandang disabilitas. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memberikan kesempatan akan akses pendidikan yang setara,” ungkap anak tengah dari tiga bersaudara ini.

Umar semakin mantap melanjutkan pendidikannya dan pilihannya jatuh pada Universitas Airlangga, kampus impiannya sejak SMA. Walaupun kuliah dilakukan secara *full* daring karena pandemi Covid-19 sejak awal hingga lulus perkuliahan, Umar tetap aktif dalam berbagai event, baik sebagai MC, moderator dan lain sebagainya. “Terhitung ada 30 lebih webinar yang memercayai saya untuk menjadi pembicara. Topiknya sesuai kompetensi saya yaitu *public speaking*, komunikasi organisasi dan isu disabilitas,” terang pria yang bercita-cita menjadi dosen ini. Pada tahun 2020 Umar juga berhasil menjadi salah satu pemenang ICON PR (Public Relations) Indonesia 2020. Selain itu Umar juga berkesempatan mengikuti kelas internasional AMERTA untuk mata kuliah *intercultural business communication* dan tergabung dalam proyek penelitian

dosen. Dengan fokus inklusivitas penyandang disabilitas, Umar berhasil menyisihkan 6.553 peserta dan lolos seleksi mewakili Indonesia bersama 500 peserta lainnya dari 120 negara dalam program United People Global (UPG) Sustainability Leadership 2022. Program tersebut diinisiasi oleh United People Global, sebuah NGO berbasis di Geneva, Swiss yang berfokus pada SDGs. “Saya menjalani kelas daring pada Maret-Juni dan setelah serangkaian kegiatan, saya dinyatakan lulus sebagai *Certified Sustainability Leader*”, imbuhnya. Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Umar, tujuan utama untuk menyelesaikan kuliah juga tak diabaikannya. Umar berhasil menjadi lulusan tercepat untuk program Magister Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga.

Semangat besar si tangan mungil

Umar merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Orang tua Umar memang sedari muda sudah tinggal di Jeddah, keduanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disana. Caci maki, *bully* dan hal-hal tidak mengenakan lainnya merupakan makanan sehari-hari bagi mereka. Apalagi gelar TKI yang disandang sudah membuat orang melihat dengan sebelah mata, ditambah tunadaksa yang diderita Umar semakin memperparah keadaan yang ada. Tapi mungkin hanya tangan Umar yang kecil, bukan semangat berjuangnya yang memiliki skala sangat besar. Dengan kegigihannya dia berhasil membungkam semua mulut yang dahulu mengeluarkan kata tak enak nan pedas bagi dirinya maupun keluarganya itu. Namun bukan hal mudah bagi dirinya ataupun baba dan mamanya. Kesabaran orang tuanya, doa tulus yang terucap, dibarengi dengan perjuangan tak kenal Lelah dari Umar kini berbuah manis. Siapa sangka anak yang dulu bahkan sempat ingin ditenggelamkan, sekarang dia bisa terbang menggapai mimpi-mimpinya satu persatu.

“Kedua orang tua saya adalah pahlawan bagi saya hingga saya bisa menjadi Umar seperti sekarang. Tanpa penerimaan mereka sejak saya bayi, mustahil saya bisa berada di titik ini. Begitu pula keluarga lainnya dan sahabat yang terus mendukung setiap langkah yang saya buat. Mereka yang selalu ada, termasuk di titik terendah saya. Tanpa dukungan mereka semua, tidak ada pencapaian positif yang saya raih,” ucap Umar yang kini bekerja menjadi staf di Kantor Humas & Protokoler Untag Surabaya.



Umar mengajak para difabel untuk keluar dari zona nyaman dan mengaktualisasi diri untuk dapat membuktikan bahwa para penyandang disabilitas itu setara.

Foto: Dok. Pribadi

Pesan Umar untuk Indonesia inklusif

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang melihat para disabilitas dengan tatapan berbeda, “Indonesia inklusif merupakan harapan bagi lebih dari 30 juta penyandang disabilitas di negeri kita tercinta,” kata Umar, “sebagai generasi terpelajar, mari melihat dunia sebagai taman bunga yang penuh warna. Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari keberagaman Indonesia. Mari bersama kita rangkul mereka”, sambung Umar yang saat ini merupakan Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas Pusat.

Umar berpesan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas, bahwa dengan keadaan fisik dan mental yang boleh berbeda, tapi hak dan kewajiban setiap orang itu sama. Dia mengajak para difabel untuk keluar dari zona nyaman dan mengaktualisasi diri untuk dapat membuktikan bahwa para penyandang disabilitas itu setara. Dia juga mengajak untuk menggunakan kesempatan studi melalui Beasiswa Afirmasi LPDP dan dapat turut serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

PAK MAMAN & JONO

TEROPONG TAHUN DEPAN



MASIH MENDING



TETAP TENANG



PREDIKSI 2023





TINGKATKAN PRODUKTIVITAS,
MAJUKAN INDONESIA

